

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta)

Tahun 2007 - 2009

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Steffy Galau

072114105

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta)

Tahun 2007 - 2009

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Steffy Galau

072114105

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

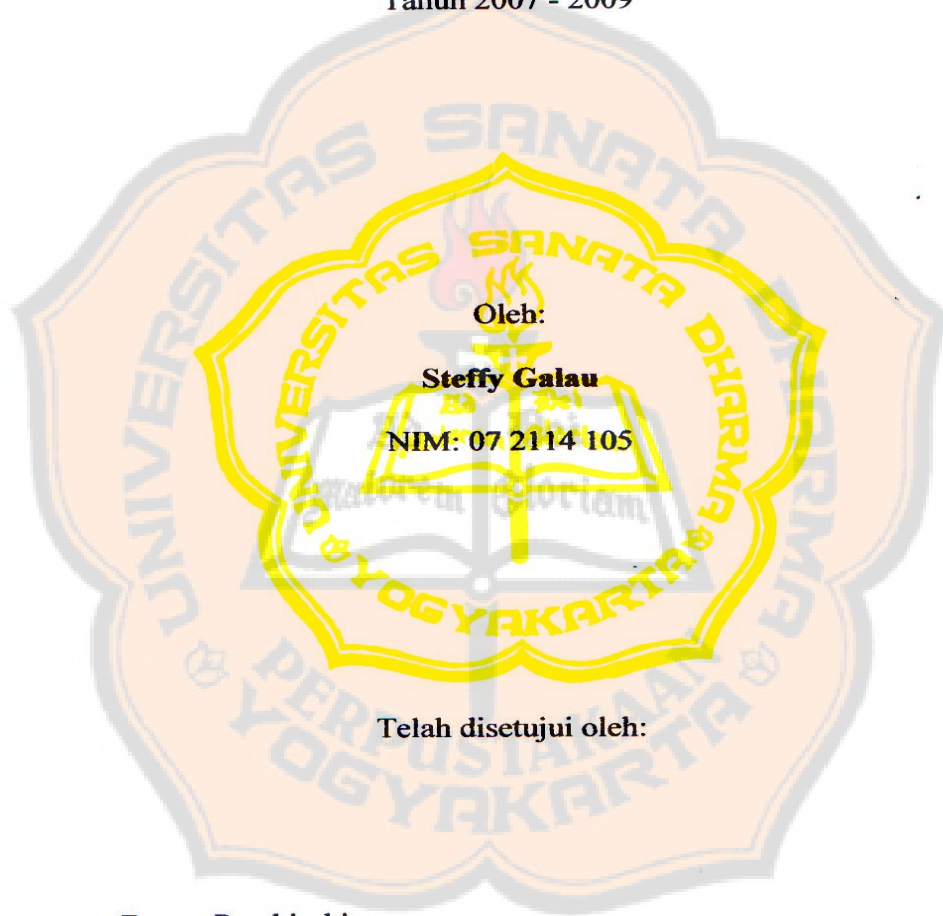
2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2009**



Oleh:

Steffy Galau

NIM: 07 2114 105

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Antonius Diksa Kuntara S.E., MFA., QIA

Tanggal 16 Juni 2011

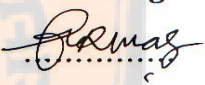
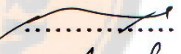
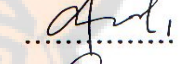

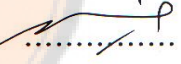
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun 2007 - 2009


Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Steffy Galau
NIM: 07 2114 105

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Josephine Wuri, S.E., M.Si	
Anggota	Antonius Diksa Kuntara S.E., MFA., QIA	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si	

Yogyakarta, 29 Juli 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



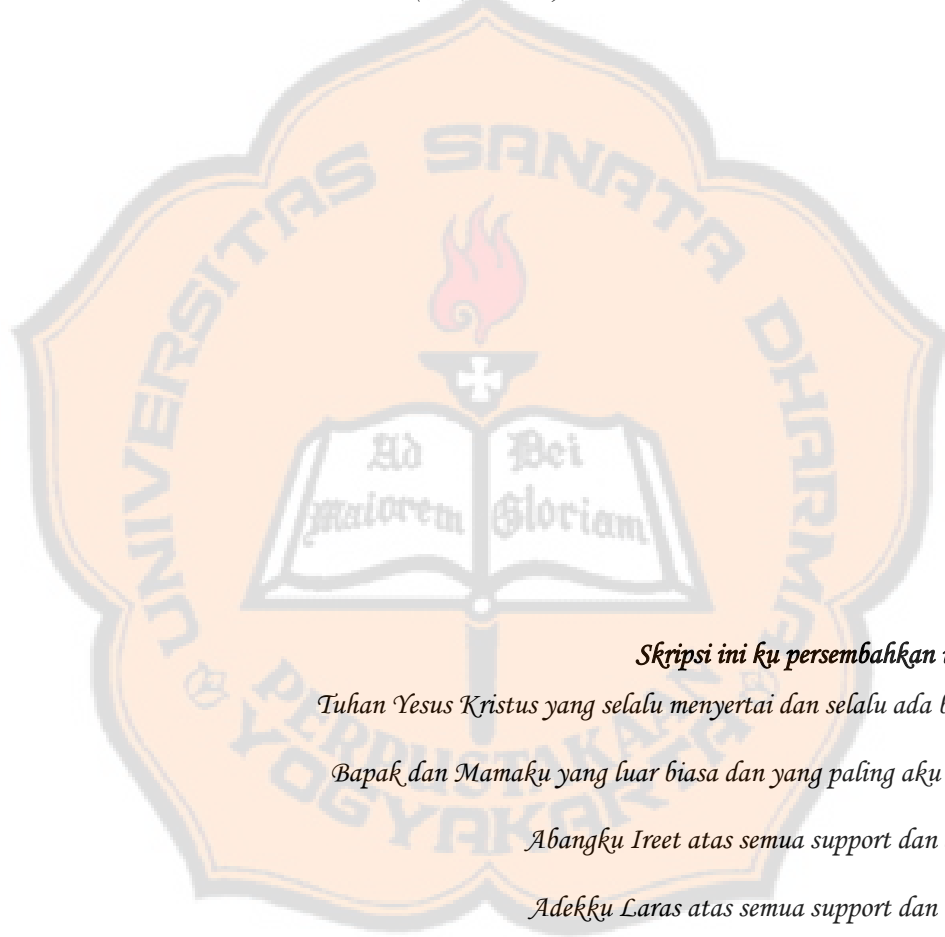

Drs. XP Supardiyono, M.Si, Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat
besar kuasanya*

(Yakobus 5:16)



Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan selalu ada buat ku

Bapak dan Mamaku yang luar biasa dan yang paling aku sayang

Abangku Ireet atas semua support dan doanya

Adekku Laras atas semua support dan doanya

My beloved friends Yulia hening, Erwin Yuwanto, dan Cerry buat semua bantuannya

Teman-teman akuntansi angkatan 2007

Semua pihak yang telah membantu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **Analisis Rasio Keuangan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2009)** dan dimajukan dan diuji pada tanggal 27 Juli 2011. adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 16 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Steffy Galau)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Steffy Galau

NIM : 072114105

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta) Tahun 2007 - 2009

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin ataupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 16 Juli 2011

Yang menyatakan



Steffy Galau

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, karunia, mujizat, dan rahmatMu Bapa, yang telah Kau limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Rasio Keuangan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan pihak lain, skripsi ini tidak dapat terselesaikan, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. **Dr. Ir. P. Wiryono P, SJ** selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah menerima saya sebagai bagian dari Keluarga Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. **Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
3. **Drs. Yusef Widya Karsana, M. Si., Akt., QIA** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. **Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA** selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, nasehat, dan semangat selama proses penulisan skripsi.
5. **Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta** yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma dan karyawan-karyawan yang telah banyak membantu.
6. **Arbak Yhoga Widodo, Se, MM**, selaku Kepala Sub bagian Umum Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
7. **Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf** bagian Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta.
8. **Kepala BAPPEDA** Kota Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. **Kepala Bagian P3ADK** Setda Kota Yogyakarta
10. **Semua karyawan di sekretariat** Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, pojok BEI, dan perpustakaan yang telah membantu penulis selama kuliah.
11. My beloved family yang paling penulis sayangi, **Bapakku Kila Vianthus, Mamaku Limang, Abangku Ireet Piety Papilo, Adekku Misske Larassati.**
12. Temen-temenku yg paling care **Yulia Hening, Erwin Yuwanto, Cerry** yang telah sabar membantu penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik doa dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima segala kritikan dan saran yang dapat membantu sehingga skripsi dapat menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 30 Juni 2011

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Otonomi Daerah.....	9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	B. Keuangan Daerah.....	14
	C. Siklus Anggaran.....	17
	D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	20
	E. Sumber Keuangan Daerah	41
	F. Analisis Rasio Keuangan Pada APBD.....	46
	G. Laporan Realisasi Anggaran	52
	H. Penelitian Terdahulu	54
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	56
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
	D. Data yang diperlukan	57
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
	F. Teknik Analisis Data	59
BAB IV	GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA	
	A. Sejarah Kota Yogyakarta	68
	B. Keadaan Geografis.....	70
	C. Penduduk dan Tenaga Kerja	73
	D. Pemerintahan	74
	E. Sosial.....	75
	F. Pertanian	77
	G. Industri.....	79

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	H. Perdagangan.....	81
	I. Perhubungan dan Komunikasi.....	83
	J. Keuangan dan Harga.....	85
	K. Konsumsi.....	87
	L. Pendapatan Daerah.....	88
BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Menghitung Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta.....	91
	1. Menghitung Rasio Kemandirian.....	91
	2. Menghitung Rasio Efektivitas.....	96
	3. Menghitung Rasio Efisiensi.....	99
	B. Analisis bidang yang realisasi APBD-nya berbeda dengan anggaran....	101
	C. Analisis hubungan tingkat kemandirian dengan belanja modal.....	113
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Keterbatasan Penelitian.....	117
	C. Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN	122

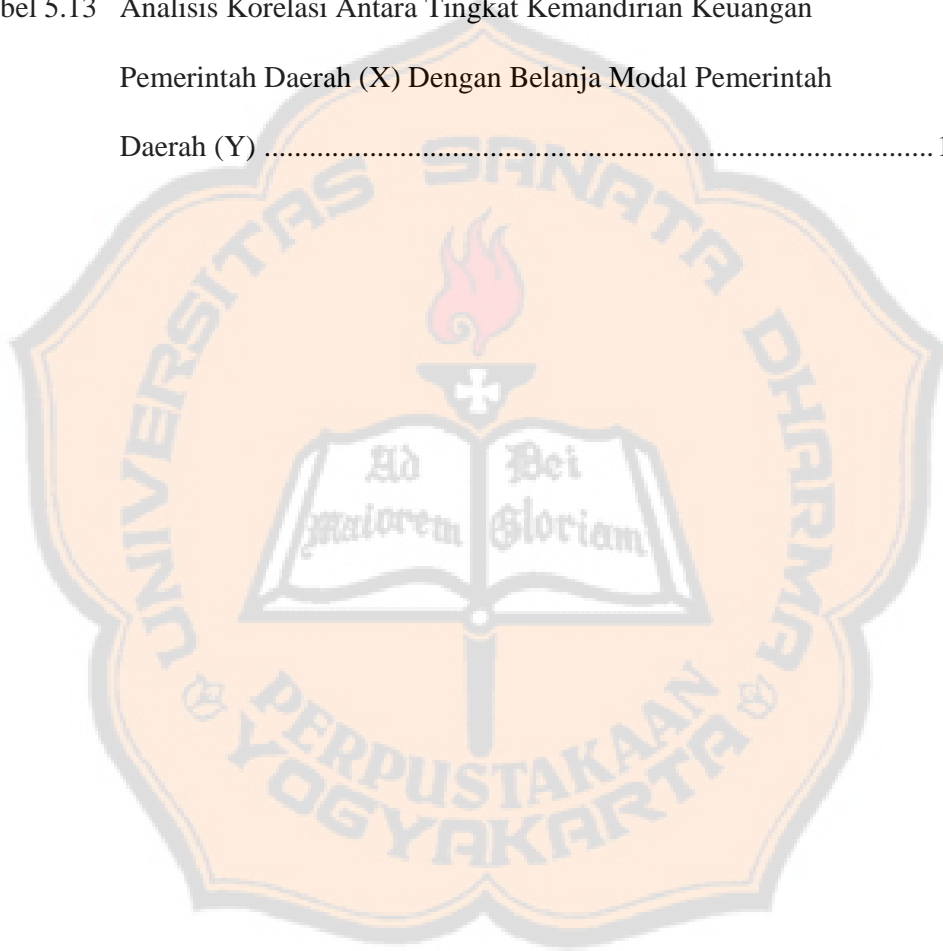
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	49
Tabel 2.2 Kategori Nilai Efektivitas PAD	50
Tabel 2.2 Kategori Nilai Efisiensi PAD	51
Tabel 5.1 Perkembangan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009	92
Tabel 5.2 Perkembangan Realisasi Total Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman Kota	92
Tabel 5.3 Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009.....	93
Tabel 5.4 Tabel Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009	95
Tabel 5.5 Perkembangan Target PAD Kota Yogyakarta tahun 2007-2009	96
Tabel 5.6 Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009	96
Tabel 5.7 Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kota Yogyakarta	98
Tabel 5.8 Rasio efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2009	99
Tabel 5.9 Tabel Trend Rasio Efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009	100
Tabel 5.10 Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta Tahun anggaran 2007	102

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.11	Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta	
	Tahun anggaran 2008	104
Tabel 5.12	Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta	
	Tahun anggaran 2009	106
Tabel 5.13	Analisis Korelasi Antara Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (X) Dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah (Y)	114



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta) Tahun 2007 – 2009

Steffy Galau
072114105
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama tahun 2007 - 2009 ditinjau dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektifitas dan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, (2) untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang anggaran dan realisasinya berbeda, (3) dan juga untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah serta untuk mencari hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Yogyakarta yang dikur melalui PAD, mencapai rata-rata 26,63% untuk setiap tahun dengan kenaikan tiap tahun sebesar 1,155%, Rasio efektivitas pemungutan PAD Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 111,28% dengan peningkatan sebesar 0,74% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efektif, sedangkan Rasio efisiensi pemungutan PAD Kota Yogyakarta mencapai rata-rata 0,34%, dengan peningkatan sebesar 0,045%. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan efisien. (2) Pada laporan realisasi APBD, antara anggaran dan realisasi di semua bidang sangat berbeda, kecuali untuk bidang transfer tidak ada anggarannya atau tidak ada transfer. (3) Tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah, yang artinya bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki hubungan dengan belanja modal.

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF FINANCIAL RATIO AND REGIONAL BUDGET
REALIZATION**

(A CASE STUDY AT YOGYAKARTA MUNICIPALITY)

YEAR 2007 – 2009

STEFFY GALAU

NIM : 072114105

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

This research aimed to know (1) Yogyakarta's financial development during the year of 2007 – 2009 as seen from the ratio of regional Financial Independency, ratio of Effectiveness and ratio of Efficiency of regional original Revenue, (2) the difference between budget plan and its realization, (3) the relationship between regional Financial Independency and regional government's capital expenditure of Yogyakarta municipality government.

This research was case study at Yogyakarta municipality government. The methods of data collection were conducted using documentation, interview, and literature study. The quantitative data analysis was used to calculate regional Financial Independency ratio, ratio of Effectiveness and regional Efficiency ratio of regional original revenue as well as to know the relationship between regional Financial Independency and regional government's capital expenditure of Yogyakarta municipality government.

The research results showed that: (1) The ratio of regional Financial Independency of Yogyakarta which was measured through its regional original Revenue, reached the average of 26.63 % per year with 1.155% increase per year, the effectivenessratio of regional original Revenue collection of Yogyakarta municipality research the average of 111.28% with 0.74% showed per year. It showed that the regional original Revenue collection Yogyakarta was already. Meanwhile, the efficiency ratio of Yogyakarta's regional original Revenue collection research the average of 0.34% with 0.045% increase per year. This showed that the cost of regional original Revenue collection was efficient. (2) in regional budget realization statement, it showed that there was significant difference between budget plan and its realization in

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

all fields, except for transfer, there was no budget plan or no transfer expenditure. (3) There was no significant correlation between level of regional Financial Independency and regional government's capital expenditure, maning that the level of regional Financial Independency of Yogyakarta municipality government had no correlation with capital expenditure.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, reformasi politik sedikit banyak telah mengubah sistem kehidupan negara. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dituntut pula untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Partisipasi itu terwujud dalam tuntutan akan akuntabilitas publik dan otonomi daerah.

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda negara Indonesia memberikan jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2002: 3). Akibat dari reformasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang itu adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kedua Undang - Undang ini diharapkan membawa dampak yang baik bagi Negara Indonesia, khususnya dalam hal tata pemerintahan dan tata keuangan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, yang kemudian membawa bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan aturan otonomi daerah yang berlaku, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempublikasikan laporan kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan. Realisasi APBD merupakan cerminan kinerja dan kemampuan daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan penyusunan anggaran daerah, menggunakan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerah yang dimiliki, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Laporan keuangan dan APBD merupakan sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah. Begitu pentingnya APBD tersebut sehingga penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan seksama dengan memperhatikan skala prioritas. Di dalam APBD itu sendiri terkandung unsur pendapatan dan belanja, dimana pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan belanja yang dimaksud adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sarana untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan atas laporan realisasi terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang telah dilaksanakan. Analisis rasio keuangan terhadap laporan realisasi APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya, yang diharapkan akan diketahui kecenderungan yang akan terjadi.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut mampu membangun daerahnya, disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam mencapai cita-cita otonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Di akhir penelitian, hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana dalam laporan realisasi APBD. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan untuk memperoleh data di lapangan dengan objek penelitian yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 - 2009. Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota provinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota, disamping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten. Otonomi Kota Yogyakarta diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang No.17 tahun 1947 pasal 1 yang menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah di Kabupaten Bantul sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama tahun 2007 – 2009 ditinjau dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah?
2. Bidang apa saja yang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerahnya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan?

3. Adakah hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal Pemerintah Daerah?

C. BATASAN MASALAH

Rasio keuangan dalam penelitian ini adalah rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian dibatasi dari tahun anggaran 2007 hingga 2009.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dalam penelitian kali ini tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama tahun 2007 - 2009 ditinjau dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektifitas dan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang anggaran dan realisasinya berbeda, dan juga untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam rangka untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber pengetahuan, menambah bahan bacaan dan referensi, baik bagi pihak internal yaitu mahasiswa Sanata Dharma, dan pihak eksternal yang berkepentingan terhadap topik yang dibahas pada penelitian ini.

3. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis dalam mengetahui kondisi kebijakan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta serta untuk memperdalam dan menerapkan teori-teori tentang keuangan daerah yang diperoleh selama dibangku kuliah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan otonomi daerah dan keuangan daerah. Kemudian akan dibahas pula tentang anggaran didalam pemerintahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber keuangan daerah, rasio kemandirian, efisiensi dan efektifitas, serta pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah, analisis rasio keuangan APBD, karakteristik APBD, fungsi APBD.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Kota Yogyakarta secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya Kota Yogyakarta, kondisi geografis dan iklim, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, transportasi, pos dan komunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan ekonomi.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis hasil analisis penelitian, serta saran-saran yang diperlukan yang berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. OTONOMI DAERAH

Secara etimologis kata otonomi berasal dari bahasa Latin, *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan atau undang-undang. Kartasasmita (1996: 346) mendefinisikan “Otonomi sebagai pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah Indonesia adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak urusan daerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Otonomi yang bertanggungjawab maksudnya ialah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi oleh karena itu dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,

kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.

7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur organisasi pemerintah daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, serta faktor kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, selama ini khususnya daerah kabupaten banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal

dana bagi penyelenggaraan urusan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang berkembang.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan kemampuan ekonomi maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Dengan demikian jelas bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah 2 (dua) undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional pun telah dikeluarkan.

B. KEUANGAN DAERAH

Pengertian Keuangan Daerah (Mamesah, 1995) yaitu sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

1. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

2. Asas-asas Keuangan Daerah

Asas-asas Keuangan Daerah menurut Mamesah (1995: 35-36) yaitu :

a. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan menyangkut segi-segi pembiayaannya.

b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas pembantuan

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

3. Prinsip-prinsip yang mendasari Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip yang mendasari Pengelolaan Keuangan Daerah (Mardiasmo, 2002:105):

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. *Value for Money*

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

C. SIKLUS ANGGARAN

Penyelenggaraan anggaran melalui tahapan-tahapan dikenal sebagai siklus anggaran. Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Siklus Anggaran terdiri dari beberapa tahap (Mardiasmo, 2002: 211) yaitu:

1. Tahap penyusunan anggaran

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus

disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor tingkat kepastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan *line-item budgeting*, akan berbeda pada *performance budgeting*, *input-output budgeting*, *program budgeting*, atau *zero based budgeting*.

2. Tahap pengesahan anggaran (ratifikasi)

Pada tahap ini, pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap pelaksanaan anggaran (implementasi)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem

informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dalam hal ini, manajer keuangan publik harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

Anggaran merupakan dokumen yang berisi rencana belanja yang akan dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan rencana pendapatan yang akan diterima untuk menutup belanja serta rencana pembiayaan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dalam satu tahun anggaran.

D. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995: 20) adalah “rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

Selain itu, definisi APBD yang dikemukakan oleh Nurlan (2007: 133), adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Kedua definisi APBD diatas, menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktifitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

2. Asas dan Fungsi APBD

Salah satu asas penting dalam menetapkan prioritas anggaran belanja yang dijabarkan dalam APBD adalah bahwa penentuan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara khusus, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian sumber pendanaan yang cukup dan memiliki landasan hukum yang kuat (PP pasal 18 No. 58 Tahun 2005). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Struktur APBD

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana,

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a) pajak daerah
 - b) retribusi daerah
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Dana perimbangan, kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil, terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
 - b) Dana Alokasi Umum.
 - c) Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
 - a) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok

masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

- b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Menurut Halim (2003: 145), “Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya”.

Menurut Halim (2004: 18), belanja daerah digolongkan menjadi 4, yakni Belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Klasifikasi belanja daerah:

1) Belanja Administrasi Umum

Menurut Halim (2004: 70), “Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik dan bersifat periodik”. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Jenis belanja pegawai/ personalia untuk belanja aparatur daerah meliputi objek belanja :

- a) Gaji dan tunjangan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- b) Gaji dan tunjangan pegawai
- c) Biaya perawatan dan pengobatan

d) Biaya pengembangan sumber daya manusia

Jenis belanja pegawai/ personalia untuk bagian belanja pelayanan publik meliputi objek belanja :

- a) Belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD
- b) Gaji dan tunjangan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c) Gaji dan tunjangan pegawai daerah
- d) Biaya perawatan dan pengobatan
- e) Biaya pengembangan sumber daya manusia

Menurut Halim (2004: 71), “Jenis belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa”. Jenis belanja barang dan jasa untuk bagian belanja aparatur daerah terdiri atas objek belanja berikut :

- a) Biaya bahan pakai habis kantor
- b) Biaya jasa kantor
- c) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor
- d) Biaya sewa kantor
- e) Biaya makanan dan minuman kantor
- f) Biaya pakaian dinas
- g) Biaya bunga utang
- h) Biaya depresiasi gedung (operasional)
- i) Biaya depresiasi alat angkutan (operasional)
- j) Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tangga

k) Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi (operasional)

Jenis belanja ini untuk bagian belanja pelayanan publik terdiri atas objek belanja berikut ini :

- a) Biaya bahan pakai habis kantor
- b) Biaya jasa kantor
- c) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor
- d) Biaya sewa kantor
- e) Biaya makanan dan minuman kantor
- f) Biaya pakaian dinas
- g) Biaya bunga utang
- h) Biaya depresiasi gedung (operasional)
- i) Biaya depresiasi alat-alat besar (operasional)
- j) Biaya depresiasi alat angkutan (operasional)
- k) Biaya depresiasi alat bengkel dan alat ukur (operasional)
- l) Biaya depresiasi alat pertanian (operasional)
- m) Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tangga
- n) Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi (operasional)
- o) Biaya depresiasi alat-alat kedokteran (operasional)
- p) Biaya depresiasi alat-alat laboratorium (operasional)

Menurut Halim (2004: 71), “Belanja perjalanan dinas merupakan jenis belanja pemerintah daerah untuk biaya

perjalanan pegawai dan dewan”. Menurut Halim (2004: 71), “Objek belanja dari jenis belanja ini untuk bagian belanja aparatur daerah meliputi biaya perjalanan dinas, sedangkan untuk bagian belanja pelayanan publik meliputi biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan pindah, dan biaya pemulangan pegawai yang gugur dan dipensiunkan”.

Menurut Halim (2004: 71), “Belanja pemeliharaan merupakan belanja pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah”. Objek belanja dari jenis belanja pemeliharaan untuk bagian belanja aparatur daerah terdiri atas:

- a) Biaya pemeliharaan bangunan gedung
- b) Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan
- c) Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga
- d) Biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi
- e) Biaya pemeliharaan buku perpustakaan
- f) Biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan

Objek Belanja untuk Jenis Belanja Pemeliharaan untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik terdiri atas :

- a) Biaya pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Biaya pemeliharaan bangunan air (irigasi)
- c) Biaya pemeliharaan instalasi
- d) Biaya pemeliharaan jaringan
- e) Biaya pemeliharaan bangunan gedung

- f) Biaya pemeliharaan monumen
 - g) Biaya pemeliharaan alat-alat besar
 - h) Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan
 - i) Biaya pemeliharaan alat-alat bengkel
 - j) Biaya pemeliharaan alat-alat pertanian
 - k) Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga
 - l) Biaya pemeliharaan alat-alat studio dan alat komunikasi
 - m) Biaya pemeliharaan alat-alat kedokteran
 - n) Biaya pemeliharaan alat-alat laboratorium
 - o) Biaya pemeliharaan buku perpustakaan
 - p) Biaya pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
 - q) Biaya pemeliharaan hewan, ternak, serta tanaman
 - r) Biaya pemeliharaan alat-alat persenjataan
- 2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Menurut Halim (2004: 72), “Belanja operasi dan pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik”.

Kelompok belanja ini meliputi jenis belanja :

- a) belanja pegawai/ personalia
- b) belanja barang dan jasa
- c) belanja perjalanan dinas
- d) belanja pemeliharaan

Menurut Halim (2004: 72), jenis belanja pegawai/ personalia untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik meliputi objek belanja berikut:

- a) honorarium/ upah
- b) uang lembur
- c) insentif.

Jenis belanja barang dan jasa baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik meliputi objek belanja:

- a) Biaya bahan/ material
- b) Biaya jasa pihak ketiga
- c) Biaya cetak dan penggandaan
- d) Biaya sewa
- e) Biaya makanan dan minuman
- f) Biaya bunga utang
- g) Biaya pakaian kerja.

Jenis belanja perjalanan dinas dan jenis belanja pemeliharaan memiliki klasifikasi yang sama dengan klasifikasi jenis belanja ini pada kelompok belanja administrasi umum, baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik. (Halim 2004 : 73)

3) Belanja Modal

Menurut Halim (2004: 73), “Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja berikut, baik untuk bagian aparatur daerah maupun pelayanan publik :

- a) Belanja modal tanah
- b) Belanja modal jalan dan jembatan
- c) Belanja modal bangunan air (irigasi)
- d) Belanja modal instalasi
- e) Belanja modal jaringan
- f) Belanja modal bangunan gedung
- g) Belanja modal monument
- h) Belanja modal alat-alat besar
- i) Belanja modal alat-alat angkutan
- j) Belanja modal alat-alat bengkel
- k) Belanja modal alat-alat pertanian
- l) Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga
- m) Belanja modal alat-alat studio dan alat-alat komunikasi
- n) Belanja modal alat-alat kedokteran
- o) Belanja modal alat-alat laboratorium

- p) Belanja modal buku/ perpustakaan
- q) Belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan
- r) Belanja modal hewan, ternak, serta tanaman
- s) Belanja modal alat-alat persenjataan/ keamanan
- t) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Menurut Halim (2004: 73), “Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berbentuk kegiatan pengalihan uang dan atau barang dari Pemerintah Daerah”.

Menurut Halim (2004: 73), “Kelompok belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terkhusus bagi kabupaten/ kota terdiri atas jenis belanja berikut (hanya untuk bagian belanja pelayanan publik)” :

- a) belanja bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa
 - b) belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan
 - c) belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan
 - d) belanja bantuan keuangan kepada organisasi profesi.
- 4) Belanja Tidak Tersangka

Menurut Halim (2004: 73), “Kelompok belanja tidak tersangka adalah belanja Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik dalam rangka mengatasi bencana alam dan atau bencana sosial”. Kelompok belanja ini terdiri atas jenis belanja tidak tersangka.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disebut Pembiayaan neto dan jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Penerimaan pinjaman daerah
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f) Penerimaan piutang daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penanaman modal Pemerintah Daerah
- c) Pembayaran pokok utang
- d) Pemberian pinjaman daerah

d. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD menurut Widodo dalam Halim (2004: 150) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Penggunaan dari analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD memang belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan, meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD menurut Mahmudi (2010: 142) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

e. Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal

Reformasi keuangan daerah telah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri karena disadari bahwa memahami kondisi dan persoalan suatu daerah adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah tersebut. Kesempatan untuk menjadi daerah yang mandiri pun terbuka lebar seiring diberlakukannya otonomi daerah (Halim, 2008).

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan investasi pembangunan jangka panjang dalam bentuk belanja modal, dan sebagainya (Mahmudi, 2009).

Dalam hal pendanaan, tingkat kemandirian merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal, (Yvonny dan Solichin, 2005). Kestinambungan pembangunan daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi. Pemerintah juga perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini yang memiliki dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah

4. Pedoman Penyusunan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007. Secara singkat, pedoman tersebut meliputi:

a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2007, perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu ada keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota untuk menciptakan sinergi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD
Penyusunan APBD perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- 2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran; APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran

anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3) Disiplin anggaran

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4) Keadilan anggaran, pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

- 5) Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
- 6) Taat azas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan daerah lainnya.

5. Teknik penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2007, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 adalah:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- b. Pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
- c. Penetapan Nota Kesepahaman KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)
- d. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD
- e. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi

- f. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD
- g. Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD
- h. Pembahasan Raperda APBD
- i. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi
- j. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

E. SUMBER KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pada uraian terdahulu berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan

daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

a. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

b. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :

- 1) Pajak hotel dan restoran
- 2) Pajak hiburan
- 3) Pajak reklame
- 4) Pajak penerangan jalan
- 5) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
- 6) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang

untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau kerana mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Pembayaran retribusi oleh masyarakat adalah :

- a. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total *cost* dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan
- b. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II adalah berikut ini :

- a. Uang leges
- b. Biaya jalan / jembatan / tol
- c. Biaya pangkalan
- d. Biaya penambangan
- e. Biaya potong hewan
- f. Uang muka sewa tanah / bangunan
- g. Uang sempadan dan izin bangunan
- h. Uang pemakaian tanah milik daerah
- i. Biaya penguburan
- j. Biaya pengerukan wc
- k. Retribusi pelelangan uang
- l. Izin perusahaan industri kecil
- m. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- n. Retribusi jembatan timbang
- o. Retribusi stasiun dan taksi
- p. Balai pengobatan
- q. Retribusi reklame
- r. Sewa pesanggrahan
- s. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut
- t. Biaya pemeriksaan susu dan lainnya
- u. Retribusi tempat rekreasi

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

3. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari saswa, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

F. ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD

Analisis rasio keuangan mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabil, analisa terhadap rasio keuangan perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2004: 283).

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2004: 282). Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara

angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan (Syafarudin 1995: 95).

Analisa rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain (Halim 2004: 284-291):

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan

demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Secara konseptual, pola hubungan anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, (Halim, 2004: 188-189):

- a. Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dengan kata lain daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipasif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan), rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2010: 143) :

Tabel 2.2
Kategori Nilai Efektivitas PAD

Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu, perlu pula dihitung rasio Efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam

melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi 2010:143):

Tabel 2.3
Kategori Nilai Efisiensi PAD

Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan antara lain seperti biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan, dan lain-lain.

G. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian terget-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Transfer
3. Belanja
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Manfaat informasi Laporan Realisasi Anggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomis.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomis yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya.
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

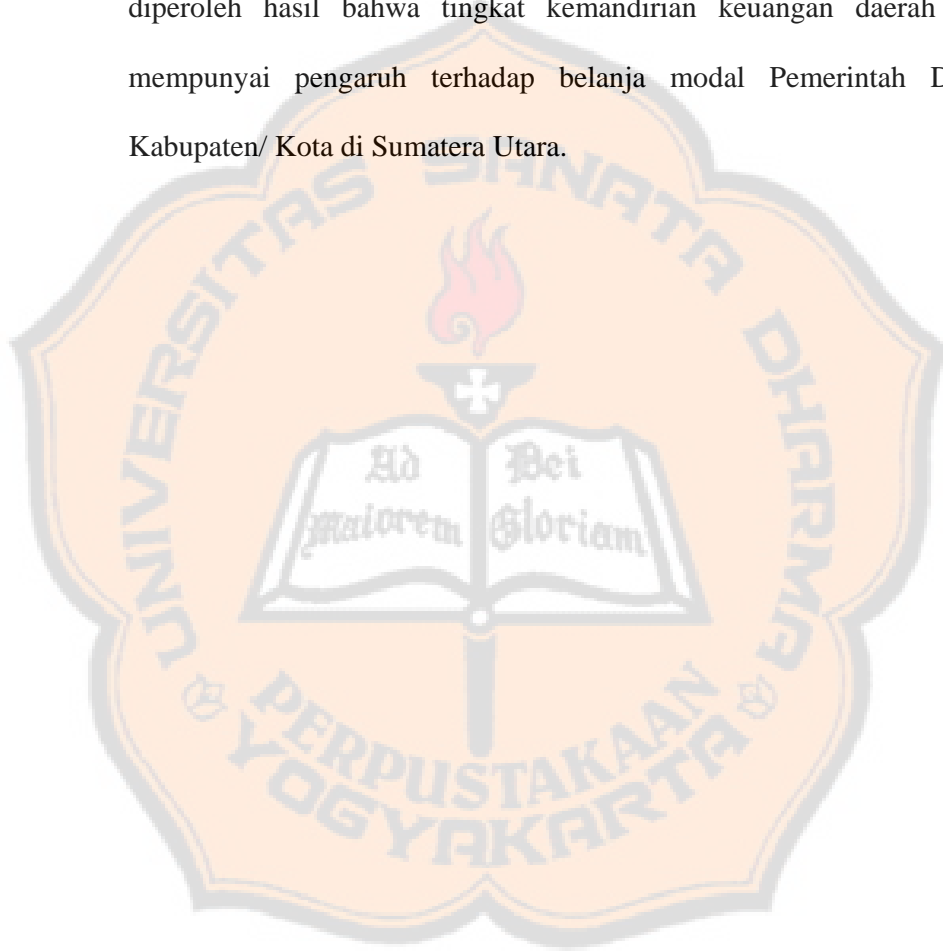
H. PENELITIAN TERDAHULU

Valentina (2009) telah melakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan pada APBD pada Pemerintahan Kota Yogyakarta. Berdasarkan analisis tersebut telah disimpulkan bahwa kemandirian Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung turun yaitu dari 19,16% untuk tahun 2005 menjadi 16,16% untuk tahun 2007. Ini berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat masih besar dalam ketersediaan dana di daerah.

Penelitian yang sejenis juga telah dilakukan oleh Muryani (2005) yang telah melakukan penelitiannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian hanya mencapai rata-rata 10,12% untuk setiap tahun dengan peningkatan sebesar 0,53% tiap tahun. Disini juga terlihat bahwa campur tangan pemerintah pusat masih cenderung dominan terhadap daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian selanjutnya adalah analisis terhadap pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Mangindang Silitonga pada tahun 2009. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian terbatas pada objek yang diteliti, serta penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2011 sampai dengan April 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subyek Penelitian

- a. Pemerintahan Kota Yogyakarta.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
 - d. Badan Pusat Statistik (BPS).
 - e. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Yogyakarta.
2. Objek Penelitian
- a. Data laporan perhitungan APBD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009.
 - b. Data laporan realisasi anggaran APBD tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

D. Data yang diperlukan

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang memiliki satuan hitung dan dapat dihitung secara sistematis, seperti laporan perhitungan APBD, laporan realisasi anggaran tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak memiliki satuan hitung dan berupa data yang tidak dapat dihitung, seperti gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta dan keterangan-keterangan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan baik berupa data primer maupun data sekunder, digunakan teknik pengumpulan data menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penulisan dan disajikan dalam bentuk literatur atau jurnal karangan ilmiah, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data ini dipergunakan untuk mendapatkan analogi yang berguna dalam perumusan teori-teori dan landasan bagi penganalisis data primer.

2. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yaitu dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai gambaran umum Pemerintahan Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dan melihat catatan-catatan yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut seperti data gambaran umum Kota Yogyakarta, Data APBD, serta menyalin hal-hal yang dianggap relevan dan perlu untuk mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan pertama, penulis menggunakan tiga langkah yaitu:

a. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Mahmudi 2010: 142) dengan langkah-langkah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

- 1) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2007 - 2009.
- 2) Menghitung total pendapatan yang berasal dari transfer pusat, provinsi dan pinjaman.
- 3) Membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan yang berasal dari transfer pusat, provinsi dan pinjaman.
- 4) Pembahasan.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak

ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Setelah menghitung Rasio Kemandiriannya, langkah selanjutnya yaitu menghitung perkembangan tingkat kemandirian menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + b X$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Y = Variabel rasio kemandirian daerah

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat $X=0$

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan
1 satuan

X = Waktu

Dari trend rasio kemandirian dapat diketahui besarnya rata-rata kemandirian dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya presentase perkembangan kemandirian tiap tahun dapat dilihat dari

besarnya nilai b. Rasio kemandirian dikatakan berkembang, jika nilai b positif.

- b. Menghitung Rasio Efektivitas (Mahmudi, 2010:143) dengan langkah-langkah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- 1) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun.
- 2) Menghitung target penerimaan PAD
- 3) Membagi realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan PAD.
- 4) Pembahasan

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas PAD tersebut, digunakan metode kuadrat terkecil (*Least Square*) dalam menentukan trend, dengan formula:

$$Y' = a + b X$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$
$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Y = Variabel rasio efektivitas

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat X=0

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan
1 satuan

X = Waktu

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dari trend rasio efektivitas pemungutan PAD dapat diketahui besarnya rata-rata efektivitas pemungutan PAD dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya presentase perkembangan efektivitas pemungutan PAD dapat dilihat dari besarnya nilai b. Sehingga efektivitas pemungutan PAD dapat dikatakan berkembang, jika nilai b positif.

c. Menghitung rasio efisiensi (Mahmudi 2010: 143) dengan langkah-langkah:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- 1) Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah dari tiap-tiap tahun.
- 2) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun.
- 3) Membagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan asli daerah.
- 4) Pembahasan.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan rasio efisiensi tersebut, digunakan metode kuadrat terkecil (*Least Square*) dalam menentukan trend, dengan formula :

$$Y' = a + b X$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Y = Variabel rasio efisiensi

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat $X=0$

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan

1 satuan

X = Waktu

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 10% - 20%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mahmudi 2010: 143). Dari trend rasio efisiensi pemungutan PAD dapat diketahui besarnya rata-rata efisiensi pemungutan PAD dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya presentase perkembangan efisiensi pemungutan PAD dapat dilihat dari besarnya nilai b . Sehingga efisiensi pemungutan PAD dapat dikatakan berkembang, jika nilai b positif.

2. Berikut ini teknik analisis data untuk menjawab permasalahan kedua:

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai Bidang apa saja kah yang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerahnya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

- a. Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi pendapatan daerah pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2007 - 2009.
- b. Menganalisis bidang-bidang apa saja kah yang realisasi dan anggarannya berbeda

3. Berikut ini teknik analisis data untuk menjawab permasalahan ketiga.

Untuk menjawab permasalahan mengenai adakah hubungan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah, digunakan rumus Korelasi Sederhana (*korelasi Pearson*) yaitu sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Korelasi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antar variabel.

Keterangan:

r = Koefisien korelasi antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.

x =Tingkat kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah

y = Belanja modal pemerintah daerah

n = Jumlah tahun yang digunakan

Bila $r = 1$ hubungan x dan y sempurna positif yang artinya apabila tingkat kemandirian daerah tinggi maka belanja modal juga tinggi

Bila $r = -1$ hubungan x dan y sempurna negatif artinya apabila tingkat kemandirian daerah tinggi maka belanja modal rendah dan sebaliknya apabila tingkat kemandirian daerah rendah maka belanja modal tinggi

Bila $r = 0$ hubungan x dan y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara tingkat kemandirian daerah dengan belanja modal.

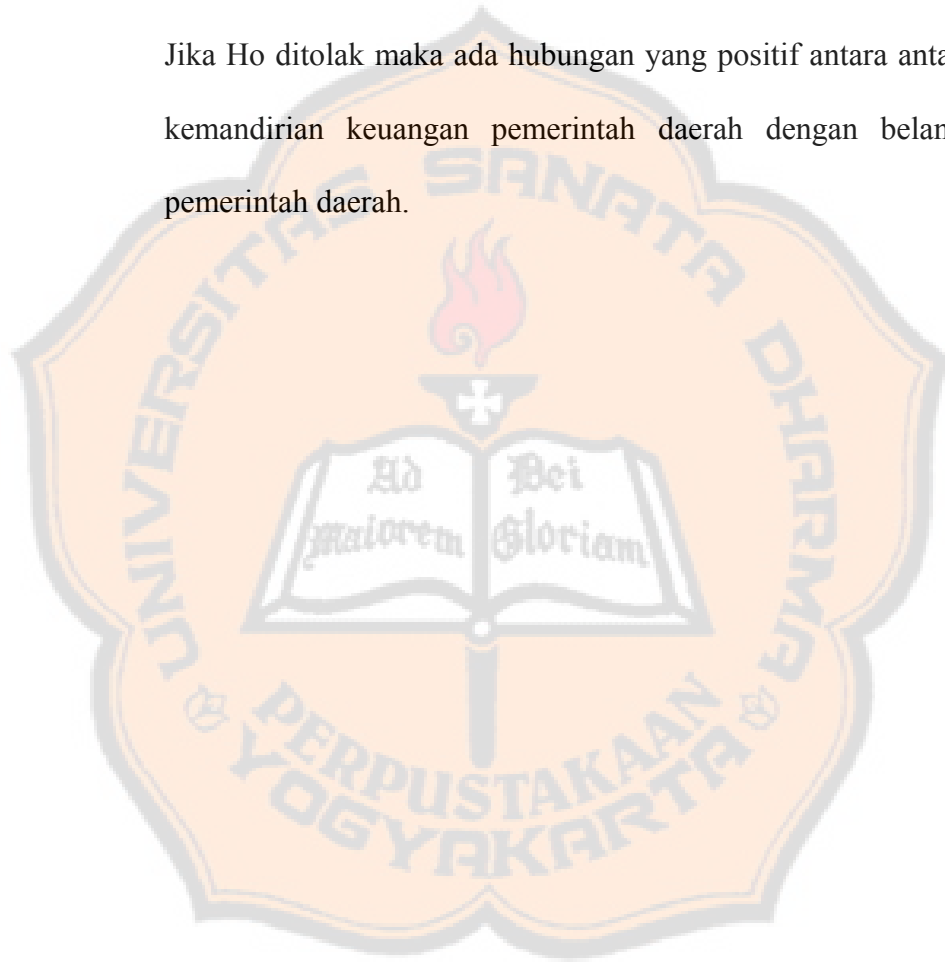
Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. H_0 : tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.
 H_a : ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.
- b. Dalam penelitian ini digunakan α sebesar 5% dengan nilai *Level of significant* sebesar 95%.
- c. Keputusan yang diambil :
 - 1) Jika angka signifikansi hasil riset $< 0,05$, maka hubungan kedua variabel signifikan
 - 2) Jika angka signifikansi hasil riset $> 0,05$, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan

d. Kesimpulan:

Jika H_0 diterima maka tidak ada hubungan yang positif antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah

Jika H_0 ditolak maka ada hubungan yang positif antara antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti yaitu Negara Mataram dibagi dua Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

B. Keadaan Geografis

1. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Wilayah Kota

Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)) :

Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

2. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
Bagian tengah adalah Sungai Code
Sebelah barat adalah Sungai Winongo

3. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta

dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/Km².

4. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia volcanic foot plain*) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

5. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

6. Demografi

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada

akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

C. Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2005, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 435.236 orang yang terdiri dari 212.712 orang laki-laki dan 222.524 orang perempuan. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS tahun 2005, tahun 2009 jumlah penduduk provinsi DIY tercatat 3.501.869 jiwa, dengan presentase jumlah penduduk laki-laki 48,87% dan penduduk perempuan 51,13%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 yaitu sebesar 0.96%, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id))

2. Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Provinsi DIY pada tahun 2009 didukung oleh 93.864 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahan tersebar pada 5 kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan, dari total PNS di DIY, 2,82% menduduki golongan I, golongan II sebesar 22,69%, 47,63% menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 26,86%. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2009 sebanyak 135.207 orang, mereka terdiri dari 54,63% laki-laki dan 45,37% perempuan.

3. Transmigrasi

Sebagai upaya melakukan pemerataan penyebaran penduduk antar wilayah di Indonesia, pemerintah melakukan transmigrasi penduduk. Jumlah transmigran dari DIY pada tahun 2009 tercatat sebanyak 336 KK atau sebanyak 1.119 jiwa. Jumlah KK transmigran terbanyak berasal dari Kabupaten Bantul serta daerah penempatan terbanyak adalah provinsi Sumatera Selatan.

D. Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggungjawab sebagai legislatif. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dengan ibukota provinsi adalah Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugasnya, dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat terdapat unsur-unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah (Setda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan, dan Kantor-Kantor.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD provinsi/ kabupaten/ kota se-Provinsi D.I Yogyakarta sebanyak 274 orang, terdiri dari fraksi PDI-P 22,99%, PAN 16,06%, Golkar dan Demokrat masing-

masing 12,04%, PKS 11,31%, Kebangkitan Bangsa 6,93%, dan partai-partai lainnya sebesar 18,61%, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id))

2. Pembagian Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yaitu: Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa, Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

E. Sosial

1. Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2009 memiliki 1.862 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 294.256 anak dan diasuh oleh 22.058 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SMP tercatat sebanyak 422 sekolah dengan 129.062 anak didik yang diasuh oleh 10.974 orang guru. Pada sekolah menengah umum, tercatat sebanyak 5.727 orang guru yang mengajar 50.036 siswa yang tersebar

pada 166 sekolah. Pada jenjang perguruan tinggi negeri, provinsi D.I Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 74.704 orang dengan jumlah dosen tetap sebanyak 2.407 orang. Adapun perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 120 institusi.

2. Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan disertai tenaga kesehatan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2009 sarana kesehatan yang tersedia di provinsi D.I Yogyakarta sebanyak 54 unit rumah sakit, 26 unit rumah bersalin, 177 unit balai pengobatan dan 120 unit puskesmas induk dan 1.542 praktek dokter perorangan.

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan sarana pelayanan dan prasarana yang memadai.

3. Agama

Dari 3.573.357 orang pemeluk agama di DIY, 92,04% diantaranya memeluk agama Islam. Disusul oleh pemeluk agama Katholik sebanyak 4,94%, pemeluk agama Kristen 2,70%, Hindu 0,17%, dan Budha 0,15%. Sejalan dengan komposisi diatas, jumlah tempat peribadatan yang tersebar di DIY juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa masjid, mushola, dan langgar yang tercatat sebanyak 96,77%. Kemudian

rumah ibadat Kristen dan Katholik masing-masing 1,74% dan 1,08% serta tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-masing 0,21% dan 0,20%.

4. Kriminalitas dan Peradilan

Kriminalitas menggambarkan terjadinya kehidupan sosial dimasyarakat, sekaligus merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan yang serius. Banyaknya perkara kriminal yang dilaporkan ke POLDA Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2008 tercatat sebanyak 5.669 kasus. Sebagian besar adalah perkara penipuan sebanyak 16,58%. Disusul oleh perkara pencurian 15,95%, curanmor 7,90%, curat 14,61%, penganiayaan ringan 7,41%, unjuk rasa 6,47% dan narkoba 5,86%.

5. Sosial lainnya

Selama tahun 2009, provinsi D.I Yogyakarta mengalami 35 kejadian bencana alam, yang berupa angin topan. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kerugian material berupa 350 kerusakan rumah. Menurut kabupaten/kota, bencana tersebut menimbulkan kerugian material terbanyak terjadi diGunungkidul yakni 40%. Kemudian di Kulonprogo dan Bantul masing-masing 20%. Kerugian material diYogyakarta dan Sleman 11,4% dan 8,57%.

F. Pertanian

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan meliputi komoditas padi, palawija serta hortikultura. Pada tahun 2009, produksi padi tercatat sebesar 837.930 ton dengan

rincian 79,05% merupakan padi sawah dan 20,95% padi ladang. Tanaman semusim yang banyak dihasilkan adalah jamur, bawang merah, cabe besar dan melon. Salak merupakan komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan oleh petani di DIY. Sedangkan buah-buahan lainnya yang mengalami peningkatan produksi adalah durian, mangga, jeruk besar, jeruk siam, jambu air, alpukat, belimbing, langsung dan nangka. Sedangkan tanaman tahunan lainnya mengalami penurunan. Penurunan produksi cukup besar terjadi pada buah manggis, diikuti sawo, sukun, pepaya, rambutan, jambu biji, nanas, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

2. Perkebunan

Dari segi produksi, tanaman perkebunan yang cukup potensial di provinsi D.I Yogyakarta adalah kelapa dan tebu. Pada tahun 2008 produksi masing-masing komoditas mencapai 52.792,54 ton atau naik 2,43% dan 15.785,31 ton atau tidak mengalami perubahan.

3. Kehutanan

D.I Yogyakarta memiliki kawasan hutan yang terkonsentrasi di Kabupaten Gunungkidul seluas 79,59% dari keseluruhan 18,71 ribu ha. Sebagian besar dari kawasan hutan tersebut merupakan hutan produksi sebesar 71,66%, hutan lindung 12,36% dan hutan kenversi 15,98%.

4. Peternakan

Populasi ternak di D.I Yogyakarta tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 6,11%, dari 684.092 ekor pada tahun 2007 menjadi 725.861 ekor. Jenis ternak yang dominan adalah kambing, sapi, dan domba. Adapun

jumlah populasi unggas tercatat sebanyak 12,43 juta ekor. Untuk memenuhi konsumsi masyarakat, jumlah ternak yang dipotong mencapai 122.474 ekor. Ternak yang dipotong terdiri dari sapi, domba, kambing, babi, kuda, kerbau. Adapun jumlah unggas yang dipotong mencapai 20,58 juta ekor yang terdiri dari ayam kampung, ayam pedaging, dan ayam ras.

5. Perikanan

Data perikanan tahun 2008 di Provinsi D.I Yogyakarta mencatat bahwa produksi perikanan mencapai 17.552 ton. Sekitar 88,95% dari total produksi perikanan merupakan hasil budidaya perikanan darat dan selebihnya 11,05% adalah hasil perikanan laut. Produksi terbesar perikanan darat berasal dari budidaya kolam yang mencapai 14.052,1 ton (90,00%), disusul hasil dari budidaya umum sebesar 876,1 ton (5,61%). Tahun 2008 nilai produksi perikanan sebesar Rp 179,71 milyar. Andil perikanan darat sebesar 92,18% dan sisanya 7,82% merupakan hasil perikanan laut.

G. Industri

1. Industri

Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi empat kelompok yakni industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri besar adalah industri yang menyerap 100 atau lebih pekerja, industri sedang/menengah adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang. Adapun

industri kecil mempekerjakan 5 -19 orang dan industri rumah tangga dengan kurang dari 5 pekerja.

Jumlah unit usaha industri besar dan sedang pada tahun 2007 di Provinsi D.I Yogyakarta tercatat 451 unit industri. Informasi industri kecil yang berlisensi dengan sumber Dinas Perindustrian mencatat bahwa jumlah industri kecil di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2009 adalah 38.623 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 128.499 pekerja. Dominasi jenis usaha industri logam dan jasa sebesar 37,47%. Sedangkan berdasarkan wilayah, sekitar 42,51% unit usaha berada di wilayah kota Yogyakarta dan menyerap 35,91% dari total pekerja industri kecil, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

2. Listrik dan Air Minum

Kebutuhan listrik digunakan untuk penerangan dan penggerak berbagai peralatan elektronik guna mempermudah kehidupan manusia. Pasokan utama listrik selama ini disuplai oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN Distribusi Jawa Tengah yang menaungi wilayah operasional Yogyakarta memiliki 8 sub unit pelayanan yang tersebar di D.I Yogyakarta. Jumlah produksi listrik yang dijual selama tahun 2009 mencapai 1.705,94 juta KWH. Energi listrik yang terjual tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga sekitar 55,43%, oleh unit usaha 20,42%, industri 11,18%, dan selebihnya 12,96% diserap oleh pelanggan umum.

Kebutuhan air penduduk Provinsi D.I Yogyakarta selain dipenuhi dengan pemanfaatan air tanah yang dilakukan sendiri oleh penduduk, juga dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki 5 perusahaan air minum yang dikelola pemerintah dan 1 perusahaan air minum yang dikelola swasta, yang memperkerjakan sebanyak 878 orang pada tahun 2009. Jumlah air baku yang diolah oleh PAM mencapai 31,78 juta kubik. Total pendapatan Perusahaan Air Minum pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 30,07% atau tercatat sebesar Rp 81.925 juta. Penerimaan dan penjualan air minum sebesar 95,43% dan sisanya 4,57% berasal dari kegiatan lainnya.

3. Konstruksi

Setelah krisis ekonomi tahun 1997, sektor konstruksi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jumlah Perusahaan Konstruksi di Provinsi D.I Yogyakarta terus bertambah setiap tahun dan mencapai jumlah 1.098 pada tahun 2008 dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 3.567 orang dan realisasi nilai konstruksi yang diselesaikan mencapai Rp 1.839,59 milyar.

Pada tahun 2008, presentase rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal di provinsi D.I Yogyakarta tercatat milik sendiri 78,93%, kontrak 7,14%, sewa 6,32%, bebas sewa 1,83%, rumah dinas 0,82%, milik orang tua/ saudara 4,88%, lainnya 0,90%.

H. Perdagangan

1. Perdagangan Dalam Negeri

Ketersediaan bahan pokok strategis seperti beras memperoleh perhatian Pemerintah dalam hal pengadaan dan distribusi guna mengendalikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Program ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras dipasaran.

Pada tahun 2009, persediaan beras yang dikuasai oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) Divre Yogyakarta mencapai 397.770,56 ton atau naik 469,83% dari tahun 2008 dan disalurkan sebesar 49.125,33 ton (12,35%). Sebagian besar penyaluran beras adalah untuk Operasi Pasar Khusus yaitu 78,79%, dan selebihnya 21,21% untuk konsumen lainnya ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

2. Ekspor dan Impor

Perkembangan transaksi ekspor dan impor menunjukkan dinamika perekonomian suatu wilayah/negara dalam konteks hubungan antar wilayah/negara. Aktivitas ini juga mengisyaratkan kemampuan daya saing produk-produk suatu negara dalam perdagangan global. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi D.I Yogyakarta mencatat nilai ekspor daerah tahun 2009 mencapai US\$ 108,70 juta. Sebagian besar volume produk diekspor melalui Tanjung Mas sebagai pelabuhan laut terdekat dengan Provinsi D.I Yogyakarta yakni sekitar 55,98%.

Dilihat menurut komoditas, presentase nilai ekspor didominasi oleh pakaian jadi dan meubel kayu masing-masing sebesar 25,50% dan 17,19%, sarung tangan kulit 10,45%, sarung tangan kulit sintesis 8,45%, kerajinan kayu 4,57%. Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama

ekspor Provinsi D.I Yogyakarta yang pada tahun 2009 melakukan transaksi sebesar US\$ 38,075 juta atau sekitar 35,03% dari total nilai ekspor.

Menurut komoditas pada tahun 2009 total impor yang bernilai sebesar US\$ 26,36 juta didominasi oleh impor tekstil sebesar 46,80%, diikuti bahan baku susu, kulit disamak dan mesin pertanian masing-masing sebesar 22,19%, 9,05%, 7,03%. Sedangkan sisanya 14,92% untuk komoditas lainnya. Menurut negara asal, nilai impor yang terbesar berasal dari China yang mencapai US\$ 6,54 juta atau 24,81% dari total nilai impor.

I. Perhubungan dan Komunikasi

1. Jalan Raya dan Angkutan Darat

Jalan raya merupakan sarana utama lalu lintas yang sangat diperlukan untuk transportasi dan kelancaran roda perekonomian, maka kondisi dan penggunaannya harus diperhatikan. Tahun 2009 dari 9.368.305 km panjang jalan di D.I Yogyakarta, panjang jalan negara sekitar 3,48%, panjang jalan provinsi 14,59%, dan panjang jalan kabupaten/kota mencapai 81,93%. Dengan jenis permukaan 77,08% aspal, 12,92% kerikil dan 10,00% tanah.

Sarana transportasi kereta api menjadi alternatif pilihan utama bagi pemakai jasa angkutan karena sifatnya yang massal dan murah. Pendapatan PT Kereta Api DAOP IV Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2009 mengalami kontraksi 42,09% atau tercatat Rp 185,92 milyar yang

sebagian besar bersumber dari penjualan tiket penumpang sekitar 88,72%, pengiriman barang sebesar 11,01% dan jasa lainnya sebesar 0,27%, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

2. Angkutan Udara

Arus transportasi udara mengalami penurunan terus menerus sejak 1996, namun mulai tahun 2000 mengalami kenaikan. Tahun 2009, jumlah pesawat datang di Bandara Adisucipto tercatat 18.080 kali sedangkan jumlah pesawat berangkat sekitar 18.070 kali. Jumlah penumpang datang yaitu 1.580.814 orang pada tahun 2009. Menurut jenis penerbangan 95,42% adalah penerbangan dalam negeri dan 4,58% penerbangan luar negeri.

3. Perhotelan

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi D.I Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indikator yang dapat menunjukkan aktivitas kepariwisataan antara lain dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan serta rata-rata lama menginap para wisatawan selama berkunjung di Yogyakarta.

Pada tahun 2009, di Yogyakarta tersedia 34 hotel bintang dengan 3.373 kamar dan 5.633 tempat tidur, serta 1.095 hotel melati dengan 12.091 kamar dan 17.735 tempat tidur. Pada tahun 2009, tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta menginap rata-rata selama 2,17 hari, sedangkan tamu domestik rata-rata menginap selama 1,43 hari.

4. Komunikasi

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Pada tahun 2008, jumlah sambungan telepon di D.I Yogyakarta tercatat sebanyak 439.433 sst. Untuk melayani masyarakat yang tidak memiliki akses langsung, layanan telekomunikasi umum juga banyak tersedia. Pengiriman surat dalam negeri tahun 2009 mencapai 20.791.861 sedangkan surat yang diterima tercatat sebesar 20.702.092.

J. Keuangan dan Harga

1. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pelaporan yang standar diperlukan untuk pemantauan posisi keuangan suatu wilayah dengan memperhatikan aspek efisiensi penggunaan keuangan publik. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap realisasi hasil pembangunan dengan anggaran yang diserap.

Berdasarkan data RAPBD Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2009 rencana penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 1,22 trilyun. Penerimaan berasal dari Dana Perimbangan 50,62%, Pendapatan Asli Daerah mencapai 48,86%, disusul penerimaan lainnya 0,52%. Sedangkan rencana anggaran belanja tahun 2009 tercatat sebesar Rp 1,41 triliyun atau minus Rp 190,45 milyar ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

2. Bank, Koperasi, Pegadaian, dan Penanaman Modal.

Bank Indonesia mencatat jumlah bank yang beroperasi di wilayah D.I Yogyakarta pada tahun 2009 sebanyak 95 bank. Besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 21,03 triliun, kredit yang disalurkan sebesar 55,74% dari total dana yang dihimpun. Dibidang perkoperasian, pada tahun 2009 jumlah lembaga ekonomi yang berbasis kerakyatan ini mencapai 2.101 koperasi. Dari keseluruhan koperasi, 96,95% koperasi non KUD dan sisanya 3,05% KUD.

Jumlah modal yang dihimpun mencapai Rp 912.318 juta. Volume usaha mencapai Rp 1.459.302 juta dengan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 36.211 juta atau 2,51% dari total volume usaha. Peran lembaga keuangan non bank seperti pegadaian dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam kesulitan keuangan untuk memperoleh pinjaman dengan prosedur yang tidak berbelit serta bunga relatif terjangkau. Jumlah nasabah yang memanfaatkan pegadaian pada tahun 2009 mencapai 406.815 orang.

Dibidang investasi, realisasi kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri yang masuk Provinsi D.I Yogyakarta sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 1,88 triliun dari rencana investasi sebesar Rp 2,53 triliun atau 74,47% dari rencana yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi kumulatif investasi penanaman modal asing (PMA) selama periode yang sama mencapai 62,01% atau tercatat sebesar US\$ 164,63 juta dan Rp 1.025,02 milyar.

3. Harga-harga

Kenaikan harga tercermin dari angka inflasi dan laju inflasi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan stabilitas ekonomi secara makro disuatu wilayah. Laju inflasi kota Yogyakarta pada tahun 2009 tercatat pada angka satu digit, yakni sebesar 2,93%. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi relatif tinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Dari besaran inflasi, dapat dikatakan inflasi kota Yogyakarta relatif lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,78% . Pada tahun 2009 rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) tercatat sebesar 125,58 dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 116,43 dengan nilai tukar petani (NTP) mencapai 107,84. Dilihat dari rata-rata indeks NTP yang bernilai diatas 100 menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh para petani dapat diimbangi dengan tingkat harga barang (komoditas) yang mereka hasilkan.

K. Konsumsi

Nilai pendapatan suatu rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sejauh ini, dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Salah satu data pengeluaran rumahtangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 575.388 per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Presentase pengeluaran untuk konsumsi makanan di daerah perkotaan meningkat, sebaliknya presentase konsumsi makanan dipedesaan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2009 presentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan diperkotaan mengalami penurunan namun dipedesaan terjadi sebaliknya.

Secara umum ketersediaan pangan nasional ditinjau dari kecukupan gizi yang diisyaratkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi ke VI (2000). Angka kecukupan kalori yang harus dicapai adalah 2200 kkal perkapita perhari pada tingkat konsumsi dan 2550 kkal perkapita perhari pada tingkat ketersediaan.

Jumlah kalori yang dikonsumsi penduduk D.I Yogyakarta pada tahun 2009 tercatat sebesar 1.802,61 k.kalori perkapita per hari. Jika dibandingkan dengan standar kecukupan kalori angka tersebut masih lebih rendah 18,06% atau sekitar 81,94% dari yang diisyaratkan. Untuk konsumsi protein tercatat sebesar 51,35 gram perkapita per hari, nilai konsumsi ini melampaui jumlah yang diisyaratkan dalam konsumsi protein, ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id))

L. Pendapatan Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku ([Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian D.I Yogyakarta tahun 2009 tumbuh sebesar 4,39%. Hal yang menggembirakan dari gambaran ekonomi D.I Yogyakarta tahun 2009 adalah pertumbuhan positif dari seluruh sektor. Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 6,30% disusul sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel dan restoran masing-masing sebesar 6,10%, 5,97%, dan 5,75%. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan paling terendah, sebesar 1,28%.

Meski andil sektor industri masih lebih kecil dari sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor pertanian ataupun sektor jasa-jasa, namun sektor industri tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat industri yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah yang tinggi.

2. Struktur Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 41.427.312 juta dengan PDRB per kapita sebesar Rp 11.816.018 atau naik 7,60%. Berdasarkan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor Pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Provinsi D.I Yogyakarta

mulai tergeser oleh sektor lain. Tahun 2009, andil terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,88%.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan pemerintahan Kota Yogyakarta ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, menganalisis bidang-bidang yang realisasi APBD nya berbeda dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta mencari adakah hubungan antara tingkat kemandirian Keuangan Daerah dengan belanja modal Pemerintah Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun 2007 sampai dengan 2009.

B. Analisi Data

1. Analisis data untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu menghitung perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2009 ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.
 - a. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan perkembangannya.
 - 1) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.1
Perkembangan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	2007	2008	2009
1	Pajak	54.783.202.892,00	62.452.770.490,00	71.852.539.011,00
2	Retribusi	29.197.466.013,00	34.940.602.210,00	23.497.748.962,00
3	Bagian Laba Usaha Daerah	8.783.239.359,78	8.454.823.854,45	10.218.454.601,27
4	Penerimaan Lain-lain	21.334.442.677,53	26.583.374.960,27	55.905.095.635,68
	Total	114.098.350.942,31	132,431,571,514.72	161.473.838.209,95

Sumber Data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

2) Menghitung jumlah Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

Tabel 5.2
Perkembangan Realisasi Total Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2009
(dalam rupiah)

No	Pendapatan	2007	2008	2009
1	Dana Perimbangan	439,159,224,538.00	504,741,154,863.00	517,366,876,957.00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2,917,756,400.00	5,140,227,999.00	10,831,673,400.00
3	Transfer Provinsi	-	-	46,059,402,800.00
4	Pinjaman	-	-	-
	Total	442,076,980,938.00	509,881,382,862.00	574,257,953,157.00

Sumber Data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3) Membagi Pendapatan Asli Daerah dengan Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

Tabel 5.3
Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009

Tahun	PAD (Rp)	Total Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah
2007	114,098,350,942.31	442,076,980,938.00	25,81%
2008	132,431,571,514.72	509,881,382,862.00	25,97%
2009	161,473,838,209.95	574,257,953,157.00	28,12%

Sumber Data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

4) Pembahasan

Dari Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam PAD tergolong rendah, karena semakin rendah angka rasio ini menunjukkan semakin rendah juga tingkat tingkat kemandirian keuangan pada pemerintah daerah.

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, besarnya rasio kemandirian berkisar antara 25,81% - 28,12%.

- a) Pada tahun 2007, rasio kemandirian Kota Yogyakarta sebesar 25,81%. Pendapatan asli daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 25,81% atau sebesar 114,098,350,942.31 terhadap total Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman yaitu Rp 442,076,980,938.00.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b) Pada tahun 2008, rasio kemandirian Kota Yogyakarta mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,97%. Pada tahun 2008, Pendapatan asli daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 25,97% atau sebesar 132,431,571,514.72 terhadap total Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman yaitu sebesar Rp 509,881,382,862.00. Kemampuan keuangan daerah pada tahun ini masih tergolong rendah dengan kenaikan sebesar 0,17% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Pada tahun 2009, rasio kemandirian Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya rasio kemandirian dari tahun 2008 yang sebesar 25,97% naik menjadi 28,12% pada tahun 2009. Walaupun kenaikannya tidak drastis tapi setidaknya bisa menunjukkan perubahan yang mulai semakin baik dan diharapkan untuk tahun selanjutnya dapat terus membaik. Pada tahun 2009, Pendapatan asli daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 28,12% atau sebesar 161,473,838,209.95 terhadap total Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman yaitu sebesar Rp 574,257,953,157.00. Kemampuan keuangan daerah pada tahun ini mulai menunjukkan perubahan yang positif. Secara keseluruhan rasio kemandirian Pemerintahan Kota Yogyakarta memiliki pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah

mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2004).

5) Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah Kota Yogyakarta

Untuk mengetahui perkembangan rasio kemandirian Daerah digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.4
Tabel Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009

Tahun	Rasio Kemandirian (Y)	x	XY	x ²	Y'
2007	25,81%	-1	-25,81%	1	25,5
2008	25,97%	0	0	0	26,6
2009	28,12%	1	28,12%	1	27,8
total	79,90%	0	2,31%	2	78,9

Sumber data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{79,90}{3} = 26,63$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum x^2} = \frac{2,31}{2} = 1,16$$

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Kota Yogyakarta cenderung naik yaitu berkisar antara 25,5% sampai dengan 27,8%. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat kemandirian Kota Yogyakarta untuk setiap tahun adalah 26,63%.

b. Menghitung Rasio Efektivitas dan perkembangan Rasio Efektivitas

- 1) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta setiap tahun (Tabel 5.1)
- 2) Menjumlahkan komponen-komponen target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahun

Tabel 5.5
Perkembangan Target PAD Kota Yogyakarta tahun 2007-2009
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	2007	2008	2009
1	Pajak	49,274,000,000	59,343,591,000	66,969,000,000
2	Retribusi	29,092,692,000	32,885,227,754	22,158,537,725
3	Bagian Laba Usaha Daerah	8,799,505,000	8.454.823.854	10,159,369,381
4	Penerimaan Lain-lain	16,996,685,000	16,211,593,443	46,159,491,000
	Total	104,162,882,000	116,895,236,051	145,446,398,106

Sumber data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

- 3) Membagi realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Tabel 5.6
Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009
(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2007	114,098,350,942.31	104,162,882,000	109.54%
2008	132,431,571,514.72	116,895,236,051	113.29%
2009	161,473,838,209.95	145,446,398,106	111.02%

Sumber data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

4) Pembahasan

Dari tabel 5.6 dapat diketahui bahwa tahun 2007 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan dan tahun 2009 rasio efektivitas mengalami penurunan.

- a) Pada tahun 2007 rasio efektivitas mencapai 109.54% yang berarti bahwa pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan pada tahun ini lebih dari 100% yang berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2007 pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp 104,162,882,000 sementara itu besarnya realisasi PAD sebesar Rp 114,098,350,942.31 yang berarti ada kelebihan target sebesar Rp 9.935.468.900.
- b) Hal yang sama terjadi juga ditahun 2008, pada tahun ini rasio efektivitas mencapai 113.29%. Hal ini berarti bahwa pemungutan PAD sudah efektif karena besarnya realisasi PAD sudah melebihi target.
- c) Pada tahun 2009, rasio efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 111.02%, namun hal ini tidak menjadi masalah yang berarti karena walaupun mengalami penurunan, pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan pada tahun itu lebih dari 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Besarnya target PAD pada tahun

2009 sebesar Rp 145,446,398,106 dan realisasi PAD sebesar Rp 161,473,838,209.95.

5) Perkembangan Rasio efektivitas PAD Kota Yogyakarta

Untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.7
Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kota Yogyakarta

Tahun	Rasio Efektivitas (Y)	x	XY	X ²	Y'
2007	109.54%	-1	-109.54%	1	110.54
2008	113.29%	0	0	0	122.12
2009	111.02%	1	111.02%	1	112.02
total	333.85%	0	1.48%	2	333.85

Sumber data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{342,68}{3} = 114,23$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum x^2} = \frac{1,48}{2} = 0,74$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemungutan PAD di Kota Yogyakarta cenderung efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 114,23 dengan peningkatan 0,74% setiap tahunnya.

Kinerja pemerintah Kota Yogyakarta cenderung makin membaik dilihat dari peningkatan rasio efektivitas untuk setiap tahunnya.

c. Menghitung Rasio Efisiensi dan perkembangan Rasio Efisiensi

- 1) Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah setiap tahun.
- 2) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahun.

Tabel 5.8
Rasio efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2009

Tahun	Biaya pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2007	241,856,350.00	114,098,350,942.31	0.21%
2008	694,728,925.00	132,431,571,514.72	0.52%
2009	489,270,355.00	161,473,838,209.95	0.30%

Sumber Data : DPDPK Kota Yogyakarta (Data diolah)

3) Pembahasan

Dari Tabel 5.8 dapat dilihat bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2009 besarnya rasio efisiensi yang dicapai dibawah 10% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah telah efisien, karena kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mahmudi 2010: 143).

a) Pada tahun 2007 rasio efisiensi sebesar 0.21%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah efisien.

b) Pada tahun 2008 rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 0,31% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0.52%. Peningkatan rasio efisiensi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD kurang efisien jika dibandingkan dengan tahun 2007.

c) Pada tahun 2009 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,22% menjadi 0,30%. Penurunan nilai efisiensi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD tahun 2009 lebih efisien jika dibandingkan dengan pemungutan PAD pada tahun 2008.

4) Perkembangan Rasio efisiensi PAD Kota Yogyakarta

Untuk mengetahui perkembangan rasio efisiensi digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.9
Tabel Trend Rasio Efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009

Tahun	Rasio Efisiensi (Y)	x	XY	X ²	Y'
2007	0.21%	-1	-0.21%	1	0,30
2008	0.52%	0	0	0	0,34
2009	0.30%	1	0.30%	1	0,39
total	1.03%	0	0.09%	2	1,03

Sumber data : DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$\alpha = \frac{\sum Y}{n} = \frac{1,03\%}{3} = 0,34$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum x^2} = \frac{0,09\%}{2} = 0,045$$

Dari Tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa biaya pemungutan PAD cenderung efisien karena rasio efisiensi kurang dari 10% yaitu rata-rata setiap tahun 0,34%.

2. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai bidang apa saja kah yang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerahnya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
 - a. Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi APBD Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2007 - 2009.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.10
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 2007

URAIAN	TA 2007	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	595,089,751,971	615,648,852,480.31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	104,162,882,000	114,098,350,942.31
Pajak Daerah	49,274,000,000	54,783,202,892.00
Retribusi Daerah	29,092,692,000	29,197,466,013.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,799,505,000	8,783,239,359.78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,996,685,000	21,334,442,677.53
PENDAPATAN TRANSFER	442,088,480,671	442,076,980,938.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442,088,480,671	439,159,224,538.00
Dana Bagi Hasil Pajak	49,705,420,217	46,824,560,104.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553,060,454	486,664,434.00
Dana Alokasi Umum	365,042,000,000	365,042,000,000.00
Dana Alokasi Khusus	26,788,000,000	26,788,000,000.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	2,917,756,400.00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	-	2,917,756,400.00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48,383,389,300	59,473,520,600.00
Pendapatan Hibah	4,988,769,000	6,288,730,100.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	43,849,620,300	53,184,790,500.00
BELANJA	683,281,388,075	569,120,372,561.96
BELANJA OPERASI	559,068,622,838	476,583,025,119.55
Belanja Pegawai	392,723,577,283	332,205,140,033.00
Belanja Barang	102,454,936,051	85,667,260,473.00
Belanja Bunga	707,120,555	707,120,553.55
Belanja Subsidi	307,192,000	306,876,000.00
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	62,875,796,994	56,696,628,060.00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-
BELANJA MODAL	100,665,794,491	89,982,396,168.00
Belanja Tanah	4,435,310,000	4,092,326,400.00
Belanja Peralatan dan Mesin	12,413,938,825	11,067,578,735.00
Belanja Gedung dan Bangunan	59,117,570,922	50,951,282,032.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22,991,214,744	22,307,082,701.00
Belanja Aset Tetap lainnya	1,387,060,000	1,252,832,300.00
Belanja Aset Lainnya	320,700,000	311,294,000.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.10
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 2007
(Lanjutan)

BELANJA TAK TERDUGA	23,546,970,746	2,554,951,274.41
Belanja Tidak terduga	23,546,970,746	2,554,951,274.41
TRANSFER		
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Surplus/(Defisit)	-88,191,636,104	46,528,479,918.35
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90,610,460,326	90,610,460,326
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90,610,460,326	90,610,460,326
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90,610,460,326	90,610,460,326
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,418,824,222	2,370,824,221.52
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembayaran Pokok Utang	958,824,222	958,824,221.52
Pemberian Pinjaman Daerah	1,460,000,000	1,412,000,000.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,418,824,222	2,370,824,221.52
Pembiayaan Netto	88,191,636,104	88,239,636,104.45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	134,768,116,022.80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.11
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 2008

URAIAN	TA 2008	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	696,352,512,005	720,252,933,374.72
PENDAPATAN ASLI DAERAH	116,895,236,051	132,431,571,514.72
Pajak Daerah	59,343,591,000.00	62,452,770,490.00
Retribusi Daerah	32,885,227,754.00	34,940,602,210.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,454,823,854.00	8,454,823,854.45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,211,593,443.00	26,583,374,960.27
PENDAPATAN TRANSFER	501,554,429,866	509,881,382,862.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	499,650,133,866	504,741,154,863.00
Dana Bagi Hasil Pajak	55,803,964,505	61,081,198,662.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	350,939,361	164,724,201.00
Dana Alokasi Umum	411,257,230,000	411,257,232,000
Dana Alokasi Khusus	32,238,000,000	32,238,000,000.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1,904,296,000	5,140,227,999.00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	1,904,296,000	5,140,227,999.00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	77,902,846,088	77,939,978,971.00
Pendapatan Hibah	20,332,060,000.00	20,332,060,000.00
Pendapatan Dana Darurat	925,274,588.00	962,407,471.00
Pendapatan Lainnya	56,645,511,500.00	56,645,511,500.00
BELANJA	815,369,220,042	698,566,664,120.78
BELANJA OPERASI	678,223,028,699	591,219,774,234.78
Belanja Pegawai	484,182,361,180	428,171,470,769.60
Belanja Barang	109,285,272,225	90,700,730,390.14
Belanja Bunga	579,027,700.00	579,027,616.04
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	28,216,140,900.00	22,180,860,900.00
Belanja Bantuan Sosial	55,960,226,694.00	49,587,684,559.00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-
BELANJA MODAL	117,948,989,549.00	107,286,061,886.00
Belanja Tanah	8,017,621,000	6,208,586,469.00
Belanja Peralatan dan Mesin	18,706,454,156	17,216,376,442.00
Belanja Gedung dan Bangunan	60,851,258,150	54,477,308,400.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28,988,318,243	28,135,315,700.00
Belanja Aset Tetap lainnya	1,077,638,000	998,186,175.00
Belanja Aset Lainnya	307,700,000	250,288,700.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.11
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 2008
(Lanjutan)

BELANJA TAK TERDUGA	19,197,201,794	60,828,000.00
Belanja Tidak terduga	19,197,201,794	60,828,000.00
TRANSFER		
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Surplus/(Defisit)	-119,016,708,037	21,686,269,226.94
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133,446,070,337	134,894,008,134.80
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	133,296,402,337	134,768,116,022.80
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	149,668,000	125,892,112.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133,446,070,337	134,894,008,134.80
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14,429,362,300	12,982,962,288.20
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,446,000,000	12,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	983,362,300	982,962,288.20
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14,429,362,300	12,982,962,288.20
Pembiayaan Netto	119,016,708,037	121,911,045,846.60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	143,597,315,073.54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.12
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 2009

URAIAN	TA 2009	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	728,820,780,075.00	749,989,016,366.95
PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,446,398,106.00	161,473,838,209.95
Pajak Daerah	66,969,000,000.00	71,852,539,011.00
Retribusi Daerah	22,158,537,725.00	23,497,748,962.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,159,369,381.00	10,218,454,601.27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46,159,491,000.00	55,905,095,635.68
PENDAPATAN TRANSFER	569,117,156,969.00	574,257,953,157.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	522,128,489,869.00	517,366,876,957.00
Dana Bagi Hasil Pajak	71,042,879,869.00	66,433,124,320.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	249,280,000.00	97,422,637.00
Dana Alokasi Umum	414,345,330,000.00	414,345,330,000.00
Dana Alokasi Khusus	36,491,000,000.00	36,491,000,000.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	929,264,600.00	10,831,673,400.00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	929,264,600.00	1,010,123,400.00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	9,821,550,000.00
Transfer Pemerintah Provinsi	46,059,402,500.00	46,059,402,800.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,059,402,500.00	46,059,402,800.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14,257,225,000.00	14,257,225,000.00
Pendapatan Hibah	144,825,000.00	144,825,000.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	14,112,400,000.00	14,112,400,000.00
BELANJA	860,974,765,851.00	783,851,692,759.66
BELANJA OPERASI	753,429,913,544.00	695,351,653,000.86
Belanja Pegawai	490,280,089,021.00	461,189,796,523.00
Belanja Barang	165,888,063,878.00	141,474,807,297.00
Belanja Bunga	459,221,795.00	459,221,794.86
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	51,671,837,850.00	49,915,246,350.00
Belanja Bantuan Sosial	45,130,701,000.00	42,312,581,054.00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-
BELANJA MODAL	94,586,338,685.00	86,735,745,635.80
Belanja Tanah	2,778,225,000.00	2,466,745,100.00
Belanja Peralatan dan Mesin	18,282,226,305.00	16,396,567,920.00
Belanja Gedung dan Bangunan	44,308,444,680.00	40,267,206,365.80
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25,360,646,700.00	24,566,338,000.00
Belanja Aset Tetap lainnya	2,378,796,000.00	1,972,323,000.00
Belanja Aset Lainnya	1,478,000,000.00	1,066,565,250.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.12
Ringkasan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 2009
(Lanjutan)

BELANJA TAK TERDUGA	12,958,513,622.00	1,764,294,123.00
Belanja Tidak terduga	12,958,513,622.00	1,764,294,123.00
TRANSFER		
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Surplus/(Defisit)	-132,153,985,776.00	-33,862,767,392.71
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	143,847,315,073.00	143,752,738,194,54
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143,597,315,073.00	143,562,038,073,54
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100,000,000.00	50,000,000.00
Penerimaan Piutang Daerah	150,000,000.00	140,700,121.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143,847,315,073.00	143,752,738,194,54
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,693,329,297.00	11,693,328,451.86
Pembentukan Dana Cadangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	1,193,329,297.00	1,193,328,451.86
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11,693,329,297.00	11,693,328,451.86
Pembiayaan Netto	132,153,985,776.00	132,059,409,742.68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	98,196,733,349.97

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Menganalisis bidang-bidang apa saja yang realisasi dan anggarannya berbeda.

1) Bidang Pendapatan Asli Daerah

Pada bidang Pendapatan Asli Daerah, untuk tahun 2007 terdapat selisih sebesar Rp 9.935.468.900, tahun 2008 sebesar 15,536,335,463.72, dan tahun 2009 sebesar 4.883.539.011. Selisih ini merupakan selisih positif atau dapat diartikan sebagai kenaikan PAD. Kenaikan pendapatan asli daerah berarti juga kenaikan terjadi pada aspek-aspek pendapatan asli daerah yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

2) Bidang Pendapatan Transfer

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan

daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda.

Pada bidang pendapatan transfer, perbedaan jelas terjadi pada anggaran dan realisasinya. Untuk tahun 2007 selisihnya berjumlah (11.499.733), tahun 2008 selisihnya 8.326.952.996, dan tahun 2009 sebesar 5.140.796.188. Selisih negatif terjadi pada tahun 2007 karena realisasinya lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Secara umum, transfer keuangan intra-pemerintahan hendaknya mampu mendorong peningkatan manajemen fiskal yang baik dan menghindari praktek yang tidak efisien (Syah dalam Halim, 2007). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Simanjuntak dalam Halim, 2004). Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri.

3) Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah

Yang dimaksud Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi hasil penjualan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Di bidang ini, selisih untuk tahun 2007 yaitu 10.635.131.300, tahun 2008 yaitu 37.132.883, untuk tahun 2009 lain-lain pendapatan yang sah jumlahnya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4) Bidang Belanja Operasi

Kepmendagri 29/2002 mengelompokkan Belanja Operasi menjadi dua yaitu Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Setiap kelompok belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan. Pada bidang belanja operasi, untuk tahun 2007 ada selisih negatif dikarenakan realisasi yang lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar (82.485.597.718,45), untuk tahun 2008 sebesar (87.003.254.464,22), dan tahun 2009 sebesar (29.090.292.498). Hal ini merupakan hal yang dianggap positif karena jumlah belanja yang terealisasi lebih kecil dari yang dianggarkan, karena pemerintah daerah bisa meminimalisir belanja yang dilakukan.

5) Bidang Belanja Modal

Menurut Halim (2004, 73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Secara teoritis apabila suatu organisasi melakukan suatu kebijakan untuk membelanjakan dana dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk belanja modal, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap anggaran operasional dan pemeliharaan organisasi tersebut. Untuk bidang belanja modal, tidak jauh berbeda dengan belanja operasi. Pada belanja modal untuk tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 terdapat selisih negatif, yang artinya bahwa realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

6) Bidang Belanja Tak terduga

Ditahun 2007 belanja tak terduga sebesar Rp 2,554,951,274.41 lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, untuk tahun 2008 sebesar Rp 60,828,000.00 ternyata berbeda dari tahun 2007 karena ditahun 2008 ini realisasi lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan ditahun 2009 sebesar Rp 1,764,294,123.00 merupakan realisasi terjadi, lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan.

7) Bidang Transfer

Untuk tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 tidak ada anggaran untuk bidang transfer.

8) Bidang Penerimaan Pembiayaan

Dibidang pembiayaan daerah bagian penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Untuk tahun 2007 anggaran dan realisasi tidak terdapat perbedaan, sedangkan untuk tahun 2008 ada kenaikan dari anggaran yang ditetapkan, begitu juga untuk tahun 2009.

9) Bidang Pengeluaran Pembiayaan

pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan / atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Tidak jauh berbeda dengan bidang-bidang lainnya, pada bidang pengeluaran pembiayaan ini juga terdapat perbedaan antara realisasi dan anggaran di tahun 2007 dan 2008, sedangkan untuk tahun 2009 realisasi sudah sesuai dengan anggaran.

3. Untuk menjawab permasalahan mengenai adakah hubungan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah, maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisa korelasi *product moment*, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Korelasi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antar variabel.

Keterangan:

r = Koefisien korelasi antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.

x = Tingkat kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah

y = Belanja modal pemerintah daerah

n = Jumlah tahun yang digunakan

Berdasarkan data pada Tabel. 5.3, Tabel. 5.10, Tabel 5.11, dan Tabel 5.12 yang dianalisis dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS, koefisien korelasi antara antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah, diperoleh Sig. (2- tailed) sebesar 0,615 diperoleh dari perhitungan SPSS yang tampak pada Tabel. 5.13

Tabel 5.13
Analisis Korelasi Antara Tingkat Kemandirian Keuangan
Pemerintah Daerah (X) Dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah (Y).

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	-.569
	Sig. (2-tailed)		.615
	N	3	3
Y	Pearson Correlation	-.569	1
	Sig. (2-tailed)	.615	
	N	3	3

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil perhitungan diatas Sig. (2-tailed) sebesar 0,615. Setelah mengetahui besarnya signifikansi tersebut diatas, maka perlu dilakukan tes hipotesa dari nilai korelasi tersebut.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Masalah : Adakah hubungan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah

b. Hipotesis :

Ho : tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.

Ha : ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.

c. Model Statistik : Korelasi Pearson

Analisis : karena Sig. (2-tailed) tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah sebesar 0,615, atau nilai Sig (0,615) > (0,05) maka Ho diterima.

d. Kesimpulan : Jika Ho diterima artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah yang artinya kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah tidak diikuti oleh kenaikan belanja modal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama tahun 2007 – 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Ditinjau dari rasio kemandirian keuangan, perkembangan keuangan yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata sebesar 26,63% untuk setiap tahun dengan kenaikan sebesar 1,16% tiap tahun. Kondisi ini, jika ditinjau dari kemampuan keuangan daerahnya maka Kota Yogyakarta belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai pola hubungan instruktif (Tabel 2.1) yang berarti bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah daerah.
 - b. Rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 mencapai rata-rata 114,23 dengan peningkatan sebesar 0,74% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta telah efektif karena kontribusi yang diberikan telah melebihi target.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 mencapai rata-rata 0,34%, dengan peningkatan sebesar 0,045%. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan efisien karena rasio efisiensi dibawah atau kurang dari 10%.
2. Untuk tahun anggaran 2007-2009, pada laporan realisasi APBD, antara anggaran dan realisasi di semua bidang sangat berbeda, kecuali untuk bidang transfer tidak ada anggarannya atau tidak ada transfer. Perbedaan ini dikarenakan kebijakan dan kebutuhan yang terjadi di Pemerintahan Kota Yogyakarta juga berbeda dari tahun ke tahun.
3. Tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tidak berhubungan dengan belanja modal, hal ini ditunjukkan pada hasil output SPSS bahwa diperoleh Sig. (2-tailed) sebesar $0,615 > 0,05$ yang artinya bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis hanya mengambil dan menggunakan data untuk tahun anggaran 2007 – 2009, selain itu penulis hanya melakukan pengukuran perkembangan keuangan terbatas pada rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, menganalisis bidang-bidang yang anggaran dan

realisasinya berbeda, dan mencari hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Sebaiknya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meningkatkan kemandirian daerahnya, karena semakin tinggi tingkat kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya Belanja Modal yang menggunakan dana asli daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat juga melakukan penelitian sejenis, namun dengan menambah jumlah tahun yang diteliti dan menambah jenis rasio yang diteliti dan juga dapat mencari hubungan antar dua variabel atau lebih yang berkaitan dengan topik yang dibahas.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan daerah*. Gorontalo: PT Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. (edisi ke 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*. Seri Bunga Rampai. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. (Edisi Pertama). Jakarta: Cides
- Leiwakabessy, Yvonny dan Solichin. 2005. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makara. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah*. Sosial Humaniora, Vol.7 No.2. Edisi Desember .
- Mamesah, D. J. Ginandjar. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- PAU SE-UGM. (2003). *Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja*. Yogyakarta: PAU SE-UGM. (tidak dipublikasikan).
- PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2007. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No 6 Tahun 2008.

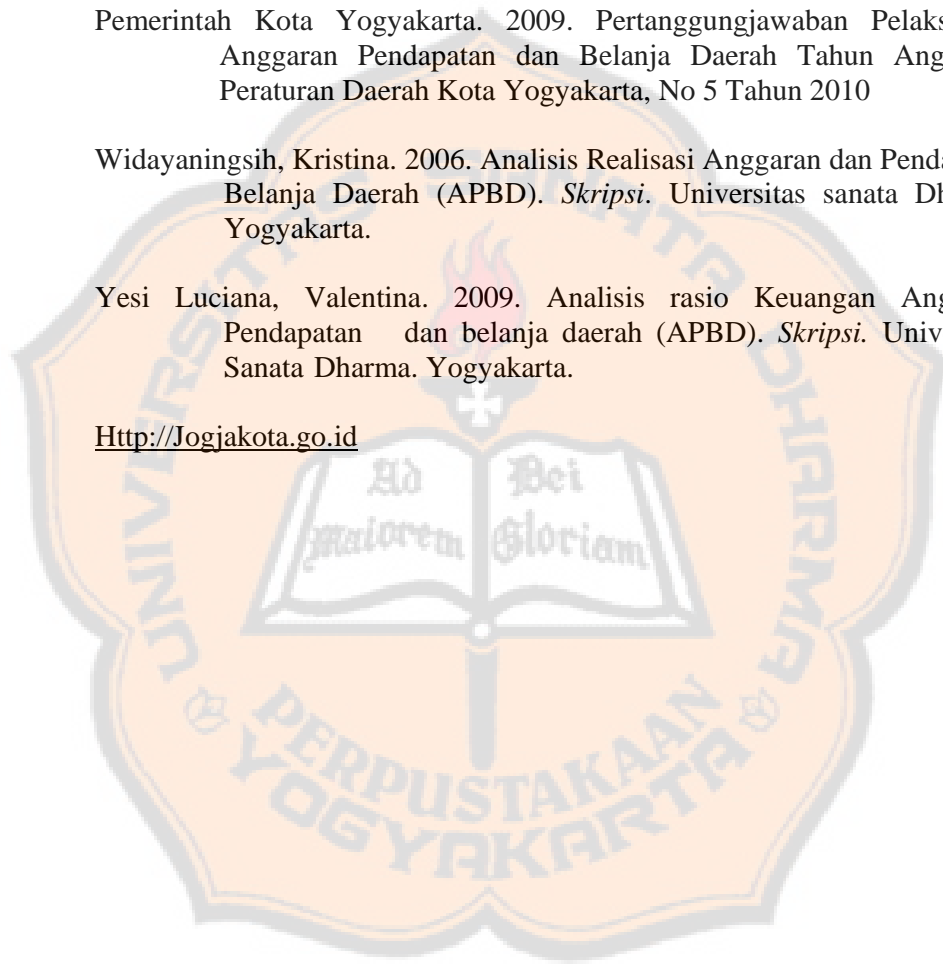
Pemerintah Kota Yogyakarta. 2008. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No 8 Tahun 2009.

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2009. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No 5 Tahun 2010

Widayaningsih, Kristina. 2006. Analisis Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *Skripsi*. Universitas sanata Dharma. Yogyakarta.

Yesi Luciana, Valentina. 2009. Analisis rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

[Http://Jogjakota.go.id](http://Jogjakota.go.id)



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 September 2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2007

Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	595.089.751.971	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31	103,45
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.162.882.000	114.098.350.942,31	9.935.468.942,31	109,54
1 1	Pajak Daerah	49.274.000.000	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00	111,18
1 2	Retribusi Daerah	29.092.692.000	29.197.466.013,00	104.774.013,00	100,36
1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82
1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sati	16.996.685.000	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53	125,52
2	PENDAPATAN TRANSFER	442.088.480.671	442.076.980.938,00	(11.499.733,00)	100,00
2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442.088.480.671	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)	99,34
2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.705.420.217	46.842.560.104,00	(2.862.860.113,00)	94,24
2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553.060.454	486.664.434,00	(66.396.020,00)	87,99
2 1 3	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000	365.042.000.000,00		100,00
2 1 4	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000	26.788.000.000,00		100,00
2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
2 2 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
2 2 2	Dana Penyesuaian	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48.838.389.300	59.473.520.600,00	10.635.131.300,00	121,78
3 1	Pendapatan Hibah	4.988.769.000	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06
3 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3 3	Pendapatan lainnya	43.849.620.300	53.184.790.500,00	9.335.170.200,00	121,29
	BELANJA	683.281.388.075	569.120.372.561,96	(114.161.015.513,04)	83,29
1	BELANJA OPERASI	559.068.622.838	476.683.025.119,55	(82.485.597.718,45)	85,25
1 1	Belanja Pegawai	392.723.577.238	332.205.140.033,00	(60.518.437.205,00)	84,59
1 2	Belanja Barang	102.454.936.051	85.867.260.473,00	(16.787.675.578,00)	83,61
1 3	Belanja Bunga	707.120.555	707.120.553,55	(1,45)	100,00
1 4	Belanja Subsidi	307.192.000	308.876.000,00	(316.000,00)	99,90
1 5	Belanja Hibah	-	-	-	-
1 6	Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994	57.090.628.000,00	(5.785.168.994,00)	91,76
1 7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
2	BELANJA MODAL	100.665.794.491	89.982.396.168,00	(10.683.398.323,00)	89,39
2 1	Belanja Tanah	4.435.310.000	4.092.326.400,00	(342.983.600,00)	92,27
2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.413.938.925	11.067.578.735,00	(1.346.360.090,00)	89,15
2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.117.570.827	50.951.282.032,00	(8.166.288.795,00)	86,19
2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.991.214.744	22.307.082.701,00	(684.132.043,00)	97,02
2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.397.060.000	1.252.832.300,00	(134.227.700,00)	90,32
2 6	Belanja Aset Lainnya	320.700.000	311.294.000,00	(9.406.000,00)	97,07
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.546.970.746	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
3 1	Belanja Tidak Terduga	23.546.970.746	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
4	TRANSFER				
4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota				
4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota				
	Surplus/(Defisit)	(88.191.836.104)	46.528.479.918,35	134.720.116.022,35	(52,76)

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.610.460.325	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90.610.460.325	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90.610.460.325	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.418.824.222	2.370.824.221,52	(48.000.000,48)	98,02
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	(0,48)	100,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	958.824.222	958.824.221,52	(48.000.000,00)	98,71
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.460.000.000	1.412.000.000,00	(48.000.000,00)	98,02
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.418.824.222	2.370.824.221,52	(48.000.000,48)	98,02
	Pembiayaan Netto	88.191.636.104	88.239.636.104,45	48.000.000,45	100,05
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		134.768.116.022,80	134.768.116.022,80	100,00

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2007 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 133.286.402.337,00
 2. SILPA RSUD tahun 2007 sebesar Rp. 982.964.058,00
 3. SILPA Taman Pintar tahun 2007 sebesar Rp. 488.749.627,00
- Rp. 134.768.116.022,80



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 /A/IIUN/2009
TANGGAL : 1 Agustus 2009



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

1	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
2	3	4	5	6	
PENDAPATAN		696.352.512.005	720.252.933.347,72	23.900.421.342,72	103,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH		116.895.236.051	132.431.571.514,72	15.536.335.463,72	113,29
Pajak Daerah	59.343.591.000,00	62.452.770.490,00	3.109.179.490,00	105,24	
Retribusi Daerah	32.885.227.754,00	34.940.602.210,00	2.055.374.456,00	108,25	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.454.823.854,00	8.454.823.854,45	0,45	100,00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.211.593.443,00	26.583.374.960,27	10.371.781.517,27	163,98	
PENDAPATAN TRANSFER		501.554.429.866	509.881.382.852,00	8.326.952.986,00	101,56
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	499.650.133.866	504.741.154.863,00	5.091.020.997,00	101,02	
1 Dana Bagi Hasil Pajak	55.803.954.505	61.081.198.662,00	5.277.234.157,00	109,46	
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	350.939.361	154.724.201,00	(186.215.160,00)	46,94	
3 Dana Alokasi Umum	411.257.230.000	411.257.232.000,00	2.000,00	100,00	
4 Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000	32.238.000.000,00		100,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.904.296.000	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00		
1 Dana Otonomi Khusus					
2 Dana Penyesuaian	1.904.296.000	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		77.902.846.088	77.939.978.971,00	37.132.883,00	100,05
Pendapatan Hibah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00		100,00	
Pendapatan Dana Darurat	925.274.588,00	962.407.471,00	37.132.883,00		
Pendapatan lainnya	66.645.511.500,00	56.645.511.500,00		100,00	
Jumlah Pendapatan	696.352.512.005	720.252.933.347,72	23.900.421.342,72	103,43	
BELANJA		815.369.220.042	698.566.664.120,78	(116.802.555.921,22)	85,67
BELANJA OPERASI		678.223.028.699	591.219.774.234,78	(87.003.254.464,22)	87,17
Belanja Pegawai	404.182.361.180	428.171.470.769,60	(56.010.890.410,40)	104,43	
Belanja Barang	109.285.272.225	90.700.730.380,14	(18.584.541.834,86)	82,99	
Belanja Bunga	579.027.700,00	579.027.616,04	(83,96)	100,00	
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	28.216.140.800,00	22.180.860.000,00	(6.035.280.000,00)		
Belanja Bantuan Sosial	55.960.226.694,00	49.587.884.559,00	(6.372.342.135,00)	88,61	
Belanja Bantuan Keuangan					
BELANJA MODAL		117.948.989.549,00	107.286.061.886,00	(10.662.927.663,00)	90,96
Belanja Tanah	8.017.621.000	6.208.586.469,00	(1.809.034.531,00)	77,44	
Belanja Peralatan dan Mesin	18.706.454.156	17.216.376.442,00	(1.490.077.714,00)	92,03	
Belanja Gedung dan Bangunan	60.851.258.150	54.477.308.400,00	(6.373.949.750,00)	89,53	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.988.318.243	26.135.315.700,00	(2.853.002.543,00)	97,06	
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.638.000	998.186.175,00	(79.451.825,00)	92,63	
Belanja Aset Lainnya	307.700.000	250.286.700,00	(57.413.300,00)	81,34	
BELANJA TIDAK TERDUGA		19.197.201.794	60.828.000,00	(19.136.373.794,00)	0,32
Belanja Tidak Terduga	19.197.201.794	60.828.000,00	(19.136.373.794,00)	0,32	
TRANSFER					
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota					
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota					
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota					
Jumlah Belanja	815.369.220.042	698.566.664.120,78	(116.802.555.921,22)	85,67	
Surplus/(Defisit)	(119.016.708.037)	21.686.269.226,94	140.702.977.263,94	(18,22)	

Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN DAERAH					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133.446.070.337	134.894.008.134,80	1.447.937.797,80	101,09
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	133.296.402.337	134.758.116.022,80	1.471.713.685,80	101,10
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	149.688.000	125.892.112,00	(23.775.888,00)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.446.070.337	134.894.008.134,80	1.447.937.797,80	101,09
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.429.362.300	12.982.962.288,20	(1.446.400.011,80)	89,95
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.446.000.000	12.000.000.000,00	(1.446.000.000,00)	
3	Pembayaran Pokok Utang	983.362.300	982.962.288,20	(400.011,80)	99,95
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.429.362.300	12.982.962.288,20	(1.446.400.011,80)	89,95
	Pembayaan Netto	119.016.708.037	121.911.045.846,60	2.894.337.809,80	102,43
	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		143.697.315.073,54	143.697.315.073,54	100,00

*CATAN :

PA Tahun Anggaran 2008 terdiri dari :

ILPA Pemkot tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 140.035.054.240,00

ISA KAS RSUD tahun 2008 sebesar Rp. 1.445.974.938,00 *

ISA Kas Taman Pintar tahun 2008 sebesar Rp. 2.115.485.895,00

Rp. 143.597.315.073,54



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(AUDITED)

Uraian	Anggaran 2009 Rp	Realisasi 2009 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2008 Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,29%	62.432.770.490,00
Pendapatan Retribusi Daerah	22.158.537.723,60	23.497.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04%	34.940.602.210,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.691,27	59.085.220,27	100,58%	8.434.823.854,45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.159.471.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11%	26.583.374.960,27
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	145.486.398.105,00	161.473.838.209,95	16.027.440.103,95	111,02%	132.431.571.514,72
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	71.042.879.869,00	66.433.124.320,00	(4.609.755.549,00)	93,51%	61.081.198.662,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	249.280.000,00	97.422.637,00	(151.857.363,00)	39,08%	164.724.201,00
Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00%	411.237.232.000,00
Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00%	32.238.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	522.128.489.869,00	517.366.876.957,00	(4.761.612.912,00)	99,09%	504.741.154.863,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus	-	1.010.123.400,00	80.858.800,00	108,70%	1.904.295.999,00
Dana Penyesuaian	929.264.600,00	9.821.550.000,00	8.892.285.400,00	1065,82%	3.235.932.000,00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	9.821.550.000,00	9.821.550.000,00	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	929.264.600,00	10.831.673.400,00	9.902.408.800,00	1165,62%	5.140.227.999,00
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00%	43.333.111.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00%	43.333.111.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer	569.117.156.969,00	574.257.953.157,00	5.140.796.188,00	100,90%	553.214.494.362,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00%	29.332.060.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	962.407.471,00
Pendapatan Lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00%	13.312.400.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.257.225.000,00	14.257.225.000,00	-	100,00%	34.606.867.471,00
JUMLAH PENDAPATAN	728.820.780.075,00	749.989.016.366,95	21.168.236.291,95	101,66%	720.252.933.347,72
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	490.280.089.021,00	461.189.796.523,00	(29.090.292.498,00)	94,07%	428.171.470.769,00
Belanja Barang	165.888.063.878,60	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,60)	85,28%	90.700.730.390,14
Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00%	579.027.616,04
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	51.671.837.830,00	49.915.246.330,00	(1.756.591.500,00)	96,60%	22.180.860.900,00
Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76%	49.587.684.559,00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	753.429.913.544,00	695.351.653.000,86	(58.078.260.543,14)	92,29%	591.219.774.234,78
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	2.778.225.000,00	2.466.745.100,00	(311.479.900,00)	88,79%	6.208.584.469,00
Belanja Peralatan dan Mesin	18.282.226.303,00	16.396.567.920,00	(1.885.658.383,00)	89,69%	17.216.376.442,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.308.444.680,00	40.267.206.365,80	(4.041.238.314,20)	90,88%	56.477.308.400,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jalinan	25.360.646.700,00	24.566.338.000,00	(794.308.700,00)	96,87%	28.135.315.700,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.378.796.000,00	1.972.323.000,00	(406.473.000,00)	82,91%	998.186.175,00
Belanja Aset Lainnya	1.478.000.000,00	1.066.565.250,00	(411.434.750,00)	72,16%	250.288.700,00
Jumlah Belanja Modal	94.586.338.683,00	86.735.745.635,80	(7.850.593.047,20)	91,70%	107.286.061.886,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61%	60.828.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61%	60.828.000,00
TRANSFER					
Transfer/Bagi Hasil ke Desa					
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	860.974.765.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04%	698.566.664.120,78

Uraian	Anggaran 2009 Rp	Realisasi 2009 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2008 Rp
SURPLUS/DEFISIT	(132.153.985.776,00)	(33.862.676.392,71)	98.291.309.383,29	25,62%	21.686.269.226,94
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA TA 2008	143.597.315.073,00	143.562.038.073,54	(35.276.999,46)	99,98%	134.768.116.022,80
Pencarian Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00%	-
Penerimaan Piutang Daerah	150.000.000,00	140.700.121,00	(9.299.879,00)	93,80%	125.892.112,00
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	143.647.315.073,00	143.752.738.194,54	(94.576.878,46)	99,93%	134.894.008.134,80
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%	-
Penyetoran Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00%	17.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	1.193.329.297,00	1.193.328.451,86	(845,14)	100,00%	982.962.288,20
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	11.693.329.297,00	11.693.328.451,86	(845,14)	100,00%	12.982.962.288,20
PEMBIAYAAN NETTO	132.153.985.776,00	132.059.409.742,68	(94.576.033,32)	99,93%	121.911.045.846,60
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2009	-	98.196.733.349,97	98.196.733.349,97	-	143.597.315.073,54

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 89.406.800.073,97
2. SISA KAS RSUD tahun 2009 sebesar Rp. 3.074.099.648,00
3. SISA Kas Tarnan Pintar tahun 2009 sebesar Rp. 5.115.827.828,00

Rp. 98.196.733.349,97



URUSAN PEM. : 1.20 - PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI SKPD : 1.20.03G - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Halaman 36

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	%	Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)		
1.20 1.20.03G 00 00 4	PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.20 1.20.03G 00 00 5	BELANJA DAERAH	825.387.711	754.678.389,00	(70.709.322,00)	91,43	
1.20 1.20.03G 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	380.669.411	342.577.789,00	(37.491.622,00)	90,14	
1.20 1.20.03G 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	380.669.411	342.577.789,00	(37.491.622,00)	90,14	
1.20 1.20.03G 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	446.318.300	412.100.600,00	(33.217.700,00)	92,54	
1.20 1.20.03G 01 00 5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	51.405.000	48.959.800,00	(1.446.200,00)	97,19	
1.20 1.20.03G 01 19 5 2	Pelayanan administrasi perkantoran	51.405.000	48.959.800,00	(1.446.200,00)	97,19	
1.20 1.20.03G 01 19 5 2 1	Belanja Pegawai	10.890.000	10.890.000,00	-	100,00	
1.20 1.20.03G 01 19 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000	38.067.800,00	(1.032.200,00)	97,36	
1.20 1.20.03G 01 19 5 2 3	Belanja Modal	1.415.000	1.002.000,00	(413.000,00)	70,81	
1.20 1.20.03G 38 00 5 2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Penguatbangan Pemerintahan dan Pendapatan Daerah	383.913.300	362.140.800,00	(31.772.500,00)	91,83	
1.20 1.20.03G 38 01 5 2	Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	254.914.000	241.866.360,00	(12.787.660,00)	84,99	
1.20 1.20.03G 38 01 5 2 1	Belanja Pegawai	190.448.000	194.189.000,00	(5.260.000,00)	97,38	
1.20 1.20.03G 38 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	52.566.000	48.044.360,00	(4.521.660,00)	97,99	
1.20 1.20.03G 38 01 5 2 3	Belanja Modal	2.650.000	1.624.000,00	(976.000,00)	62,46	
1.20 1.20.03G 38 02 5 2	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	139.299.300	120.264.450,00	(19.014.850,00)	86,35	
1.20 1.20.03G 38 02 5 2 1	Belanja Pegawai	80.535.000	79.970.000,00	(5.565.000,00)	90,33	
1.20 1.20.03G 38 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	50.754.300	40.314.450,00	(10.449.850,00)	79,41	
1.20 1.20.03G 38 02 5 2 3	Belanja Modal	8.010.000	0,00	(8.010.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA:	825.387.711	754.678.389,00	(70.709.322,00)	91,43	
	SURPLUS(DEFISIT)	(825.387.711)	(754.678.389,00)	70.709.322,00	91,43	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

URUSAN PEM. : 1.20-PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.03G-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Halaman **33**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
1.20.1.20.03G.00.00.4	PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.20.1.20.03G.00.00.5	BELANJA DAERAH	1.597.167.655	1.423.559.408,00	(173.608.247,00)	89,13	
1.20.1.20.03G.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	411.241.655	372.336.933,00	(38.904.722,00)	90,54	
1.20.1.20.03G.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	411.241.655	372.336.933,00	(38.904.722,00)	90,54	
1.20.1.20.03G.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.185.926.000	1.051.222.475,00	(134.703.525,00)	88,64	
1.20.1.20.03G.01.00.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.440.000	71.555.820,00	(3.884.180,00)	94,85	
1.20.1.20.03G.01.10.5.2	Pelayanan administrasi perkantoran	75.440.000	71.555.820,00	(3.884.180,00)	94,85	
1.20.1.20.03G.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	28.098.000	25.948.000,00	(150.000,00)	98,43	
1.20.1.20.03G.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.241.000	42.873.860,00	(3.367.150,00)	92,72	
1.20.1.20.03G.01.10.5.2.3	Belanja Modal	3.101.000	2.734.000,00	(367.000,00)	88,17	
1.20.1.20.03G.38.00.5.2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah	1.110.486.000	979.666.825,00	(130.819.375,00)	88,22	
1.20.1.20.03G.38.01.5.2	Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	724.901.000	694.728.925,00	(30.172.075,00)	95,84	
1.20.1.20.03G.38.01.5.2.1	Belanja Pegawai	501.166.000	486.806.000,00	(14.360.000,00)	97,13	
1.20.1.20.03G.38.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.736.000	207.922.925,00	(15.812.075,00)	92,93	
1.20.1.20.03G.38.01.5.2.3	Belanja Modal					
1.20.1.20.03G.38.02.5.2	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	385.685.000	284.937.700,00	(100.647.300,00)	73,90	
1.20.1.20.03G.38.02.5.2.1	Belanja Pegawai	188.325.000	156.135.000,00	(33.200.000,00)	82,37	
1.20.1.20.03G.38.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.240.000	129.802.700,00	(67.447.300,00)	65,81	
1.20.1.20.03G.38.02.5.2.3	Belanja Modal					
	JUMLAH BELANJA:	1.597.167.655	1.423.559.408,00	(173.608.247,00)	89,13	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.597.167.655)	(1.423.559.408,00)	173.608.247,00	89,13	

Halaman 67

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1.20 1.20.03E 01 10 5 2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.722.350	17.704.800,00	(17.550,00)	99,90	
1.20 1.20.03E 01 10 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	17.722.350	17.704.800,00	(17.550,00)	99,90	
1.20 1.20.03E 01 10 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 11 5 2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	10.999.920,00	(80,00)	100,00	
1.20 1.20.03E 01 11 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 11 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	10.999.920,00	(80,00)	100,00	
1.20 1.20.03E 01 11 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03C 01 12 5 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	900.000	897.800,00	(2.400,00)	99,73	
1.20 1.20.03C 01 12 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03C 01 12 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000	897.800,00	(2.400,00)	99,73	
1.20 1.20.03C 01 12 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 13 5 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.430.000	20.366.600,00	(73.500,00)	99,64	
1.20 1.20.03E 01 13 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 13 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	18.040.000	18.026.500,00	(13.500,00)	99,92	
1.20 1.20.03E 01 13 5 2 3	Belanja Modal	4.390.000	4.339.100,00	(50.000,00)	98,63	
1.20 1.20.03E 01 14 5 2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.205.000	1.181.000,00	(104.000,00)	91,91	
1.20 1.20.03E 01 14 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 14 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000	1.181.000,00	(104.000,00)	91,91	
1.20 1.20.03E 01 14 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 15 5 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.350.000	3.209.800,00	(148.900,00)	95,58	
1.20 1.20.03E 01 15 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 15 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.908.000	1.460.000,00	(148.000,00)	90,80	
1.20 1.20.03E 01 15 5 2 3	Belanja Modal	1.750.000	1.749.800,00	(800,00)	99,97	
1.20 1.20.03E 01 16 5 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 16 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 16 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 16 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 17 5 2	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.920.000	13.100.700,00	(2.827.300,00)	52,25	
1.20 1.20.03E 01 17 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 17 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000	13.100.700,00	(2.827.300,00)	52,25	
1.20 1.20.03E 01 17 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 18 5 2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.000.000	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
1.20 1.20.03E 01 18 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 18 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
1.20 1.20.03E 01 18 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 20 5 2	Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 20 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 20 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 01 20 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20 1.20.03E 38 00 5 2	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah	1.048.233.500	836.729.475,00	(211.504.025,00)	79,82	
1.20 1.20.03E 38 01 5 2	Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	558.090.500	488.270.355,00	(68.820.145,00)	87,67	
1.20 1.20.03E 38 01 5 2 1	Belanja Pegawai	230.428.000	225.552.000,00	(4.876.000,00)	97,88	
1.20 1.20.03E 38 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	327.662.500	263.718.355,00	(63.944.145,00)	80,48	
1.20 1.20.03E 38 01 5 2 3	Belanja Modal	-	-	-	-	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0856
2011/34

Membaca Surat : Dari Ka. Prodi Akuntansi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
Nomor : 31/Kaprodi Akl/799/III/2011 Tanggal : 24/03/2011

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : STEFFY GALAU NO MHS / NIM : 072114105
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta
Penanggungjawab : Antonius Diksa Kuntara, S. E., MFA., QIA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2006 - 2010

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30/03/2011 Sampai 30/06/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Perizinan

STEFFY GALAU

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 30-3-2011

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NRP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yk
3. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
4. Ka. BPS Kota Yogyakarta
5. Ka. Bag. P3ADK Setda Kota Yogyakarta
6. Ka. Prodi Akuntansi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
7. Ybs.